



Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen

Review Rencana Strategis 2016 - 2021



Jl. Arungbinang No. 21 Kebumen

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2016 - 2021 dapat terselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Renstra ini merupakan implementasi dari RPJMD dan bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen di Bidang Kelautan dan Perikanan periode 2016 – 2021 agar kebijakan yang dimaksud tepat sasaran sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Renstra-SKPD ini adalah dokumen perencanaan yang merupakan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Kami mengharapkan Renstra-SKPD dapat bermanfaat sebagai salah satu alat pengarah penyusunan perencanaan dan alat evaluasi, serta dasar penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen, sehingga pada saatnya nanti dapat terwujud pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Akhirnya kami mengharapkan kritik, saran, masukan serta dukungan semua pihak, demi suksesnya pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah diprogramkan dalam Renstra-SKPD ini dan atas bantuan semua pihak yang terkait dengan penyusunan Renstra-SKPD ini diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kebumen

Drs. LA ODE HASLAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Hubungan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN	8
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen	8
B. Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen	13
C. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen	18
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	27
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen	27
B. Identifikasi Isu-Isu Strategis	31
C. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	32

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	37
A. Visi	37
B. Misi	38
C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	39
D. Perumusan Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah	40
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF	45
A. Rencana Program	46
B. Rencana Kegiatan	46
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	52
BAB VII PENUTUP	56
A. Pedoman Transisi	56
B. Kaidah Pelaksanaan	56
LAMPIRAN	58

DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1	Daftar Komposisi SDM Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2016	13
Tabel. 2.2	Data Sumber Daya Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016	15
Tabel. 2.3	Data Sarana dan Prasarana Pendukung Kelautan dan Perikanan Tahun 2015	16
Tabel. 2.4	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
Tabel 2.5	Data Produksi Hasil Perikanan secara Keseluruhan di Kabupaten Kebumen	20
Tabel. 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah	22
Tabel 2.7.	Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen terhadap Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan	23
Tabel 2.8	Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten/Kota	24
Tabel 2.9	Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021	25

Tabel 3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	28
Tabel 3.2.	Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal).....	32
Tabel 3.3.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	33
Tabel 4.1.	Target Indikator Kinerja Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan	40
Tabel 4.2.	Tabel Bantu Penentuan Alternatif Strategi	42
Tabel 4.3.	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	43
Tabel 5.1.	Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan SKPD beserta Rencana Pendanaannya Tahun 2016-2021	48
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Program yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Daerah Dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021	52
Tabel 6.2	Indikator Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Hubungan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5
Gambar 2.	Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen	8

BAB I

PENDAHULUAN

F. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan instansi jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi instansi, yang disusun menyesuaikan kepada sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) dan bersifat indikatif.

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 15 ayat (1) dan pasal 19

ayat (2), bahwa Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan serta berkelanjutan. Disamping itu sesuai dengan Inpres Nomor 2 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Diktum kedua, setiap instansi pemerintah sampai tingkat Eselon II wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah , Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan. Pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya untuk memanfaatkan potensi yang tersedia, mencari solusi pemecahan masalah yang ada serta berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam mewujudkan kondisi kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.

Kabupaten Kebumen memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan bidang kelautan dan perikanan karena secara geografis kondisi wilayahnya sangat mendukung untuk pengembangan budidaya perikanan karena memiliki perairan umum berupa sungai, waduk, kolam dan areal persawahan yang cukup luas. Disamping perairan darat, Kabupaten Kebumen juga memiliki perairan laut dengan panjang pantai 57,5 (lima puluh tujuh koma lima) kilometer yang terbentang mulai dari Kecamatan Mirit di ujung timur sampai dengan Kecamatan Ayah di ujung barat.

Dari segi topografis wilayah Kabupaten Kebumen terdiri dari dataran rendah, perbukitan dan dataran tinggi dengan jumlah penduduk tahun 2014 sebanyak 1.182.972 (satu juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) jiwa yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Di wilayah dataran rendah bagian selatan, Kabupaten Kebumen memiliki wilayah pesisir dan

perairan umum daratan dengan jumlah nelayan sebanyak 4.774 (Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat) orang.

Potensi kelautan dan perikanan Kabupaten Kebumen yang cukup besar, harus dapat dikelola dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakatnya. Untuk itu diperlukan penjabaran dalam bentuk kegiatan dan rencana aksi secara konsisten yang tertuang dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021, yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan setiap tahunnya.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen ini merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021. Oleh Karena itu, proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

Penyusunan dokumen Renstra ini, disamping berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan, juga berdasarkan pada analisis lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2014-2018. Kemudian dokumen Renstra ini dilengkapi dengan indikator kinerja beserta pendanaanya sehingga akuntabilitas pelaksanaan beserta pengorganisasiannya dapat dievaluasi selama periode 2016-2021. Pada tahap implementasi fungsi Renstra menjadi sangat penting, karena digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek (1 tahun), yaitu Rencana Kerja Instansi, dan Rencana Kerja Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen selama 5 (lima) tahun.

Dokumen Renstra ini dijadikan acuan dan arahan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan selama tahun 2016-2021 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan efektif. Meskipun demikian, Renstra merupakan *living document*, yang dapat

disempurnakan apabila diperlukan, disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis organisasi yang terjadi.

G. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
6. Undang-undang nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat ;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.
 19. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan.

H. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis merupakan salah satu alat untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien sampai kepada implementasi garis terdepan, sehingga tujuan dan sasaran organisasi tercapai.

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 adalah :

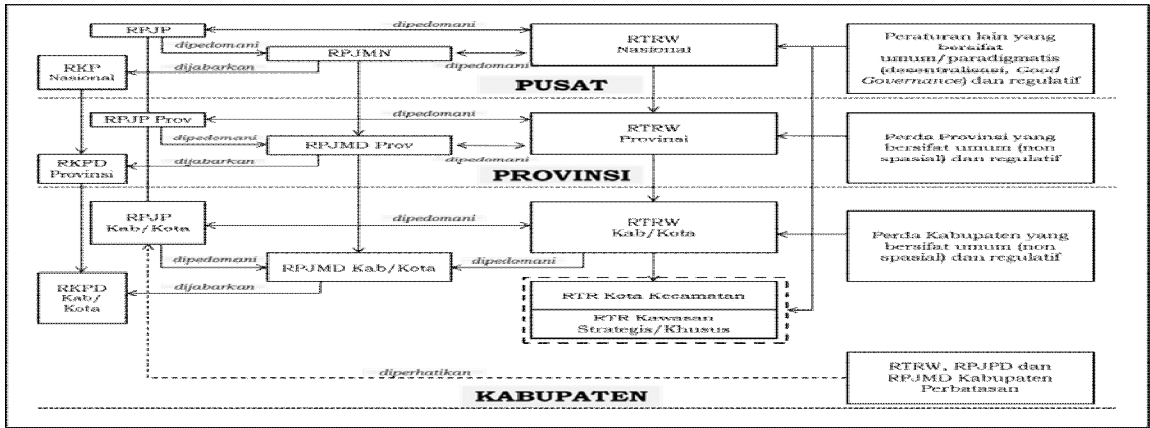
- a. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yang memuat indikator sasaran dan atau indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah selama jangka waktu lima tahun dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;

b. Memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Selanjutnya tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 adalah :

1. Merumuskan arah, strategi dan kebijakan Perangkat Daerah berdasarkan tupoksi dan evaluasi pembangunan lima tahun sebelumnya;
2. Merumuskan indikator kinerja Perangkat Daerah beserta target pencapaian selama kurun waktu lima tahun;
3. Merencanakan program, kegiatan beserta indicator target kinerja dan kerangka pendanaan selama kurun waktu lima tahun.

I. **Hubungan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**



Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
2. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;

3. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen 2011-2031;
4. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan.

J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2016 - 2021 selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan penyusunan, hubungan rencana strategis dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat struktur organisasi, susunan kepegawaian, tugas pokok dan fungsi, serta sarana dan prasarana serta ruang lingkup kegiatan/pelayanan.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini memuat gambaran secara umum tentang Kabupaten Kebumen, kondisi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen, serta kondisi yang diinginkan, serta analisa lingkungan dan faktor-faktor kunci keberhasilan (pendorong dan penghambat).

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.

Bab ini memuat tentang visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Bab ini memuat program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dengan mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021.

BAB VII. PENUTUP

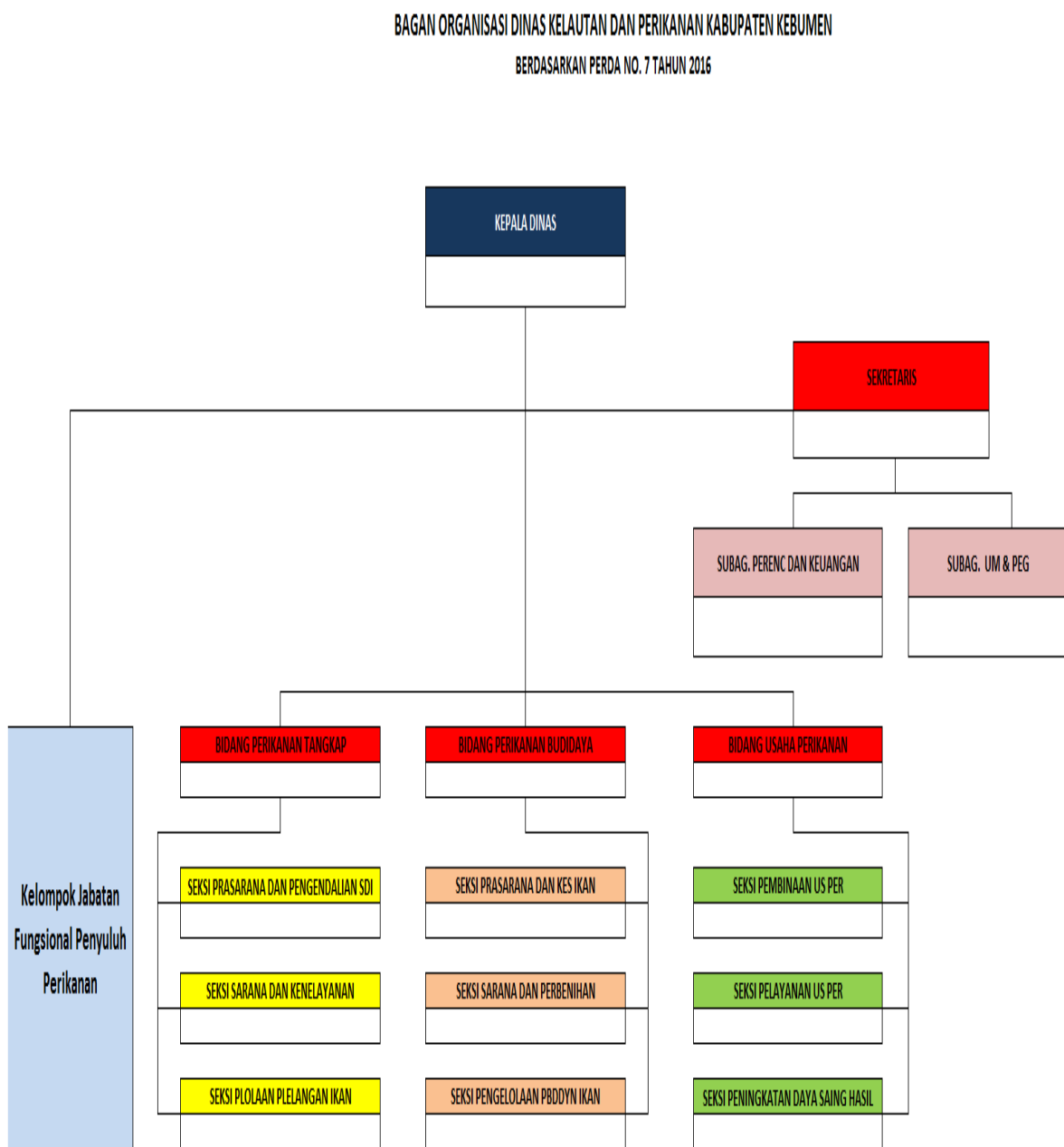
Bab ini berisi pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

LAMPIRAN

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN

D. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen sebagai berikut :



Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan , mempunyai tugas

membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

1. Penyusunan rencana dan program di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan usaha perikanan ;
2. Perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan usaha perikanan ;
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan usaha perikanan ;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan usaha perikanan ;
5. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan usaha perikanan ;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas ;
7. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris dan tiga Kepala Bidang yang terdiri dari Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Kepala Bidang Usaha Perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh dua orang Kasubag yaitu Kasubag Perencanaan dan keuangan serta Kasubag Umum dan Kepegawaian . Kepala Bidang Perikanan Tangkap dibantu tiga orang Kepala Seksi yaitu Kasi Sarana dan Kenelayanan, Kasi Prasarana dan Pengendalian Sumberdaya Ikan serta Kasi Pengelolaan Pelelangan Ikan . Kepala Bidang Perikanan Budidaya dibantu tiga orang Kepala Seksi yaitu Kasi Sarana dan Perbenihan, Kasi Prasarana dan Kesehatan Ikan serta Kasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan. Sedangkan Kepala Bidang Usaha Perikanan dibantu oleh tiga orang Kepala Seksi

yaitu Kasi Pembinaan Usaha Perikanan, Kasi Pelayanan Usaha Perikanan serta Kasi Peningkatan Daya Saing Hasil Perikanan. Selain itu juga masih ada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok Jabatan Fungsional yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

a. Sekretariat

Sebagaimana dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen, Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas. sedangkan fungsinya antara lain :

1. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas ;
2. pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas ;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas ;
4. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas ;
5. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang – undangan di lingkungan Dinas ;
6. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi ;
7. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas ;

8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya ; dan
9. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

b. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantaun, evaluasi serta pelaporan meliputi sarana dan kenelayanan, prasarana dan pengendalian sumberdaya ikan serta pengelolaan tempat pelelangan ikan. Sedangkan fungsinya antara lain :

- 1) Pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan prasarana perikanan tangkap dan sarana penangkapan ikan ;
- 2) Pendidikan dan pelatihan, pendampingan dan perlindungan, kemitraan, pemberian kemudahan akses, ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi bagi nelayan kecil ;
- 3) Pengendalian sumberdaya ikan di perairan umum daratan ;
- 4) pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan ikan ;dan
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi sarana dan perbenihan, prasarana dan kesehatan ikan serta pengelolaan pembudidayaan ikan.

Sedangkan fungsinya antara lain :

- 1) Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana perikanan budidaya serta laboratorium ;
- 2) Pendidikan dan pelatihan, pendampingan dan perlindungan, kemitraan, pemberian kemudahan akses, ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta pengembangan agrobisnis bagi pembudidaya ikan kecil ;
- 3) Pembudidayaan ikan di perairan umum daratan (culture base fisheries) ;

- 4) Penyediaan benih dan calon induk bermutu serta fasilitasi sertifikasi pembudidayaan/pembenihan ikan yang baik (cara pembenihan yang baik/cara budidaya ikan yang baik);
- 5) Pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit, pengawasan obat ikan, pengembangan kawasan perikanan budidaya dan fasilitasi sertifikasi keamanan dan mutu serta lingkungan ;
- 6) Pengelolaan dan penyelenggaraan pembudidayaan ikan termasuk pemasarannya pada asset milik Dinas; dan
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

d. Bidang Usaha Perikanan

Bidang Usaha Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan perikanan, pelayanan perikanan serta peningkatan daya saing hasil perikanan. Sedang fungsinya antara lain :

1. Pembinaan teknis, kelembagaan, ekonomi, hukum dan ekologis bagi kelompok nelayan dan pembudidaya ikan kecil serta usaha pendukungnya ;
2. Penerbitan kartu identitas nelayan dan pembudidaya ikan kecil, surat tanda pencatatan/pendaftaran kelompok dan usaha, rekomendasi surat izin usaha perikanan, rekomendasi pembelian bahan bakar minyak dan rekomendasi kredit program bagi nelayan dan pembudidaya ikan kecil serta usaha pendukungnya ;
3. Pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana peningkatan daya saing, akses penjualan, promosi, mutu, pendidikan dan pelatihan, pendampingan, kemitraan usaha, pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi bagi kelompok usaha peningkatan daya saing hasil perikanan produksi nelayan dan pembudidaya ikan kecil dalam wilayah kabupaten; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen

Sumberdaya yang dimiliki Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan pendukung utama dalam mencapai setiap tujuan dan kinerja Dinas karena sumberdaya yang dimiliki merupakan modal pelayanan publik. Sumberdaya yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan dikategorikan dalam 3 sumberdaya, yaitu : SDM, sarana/prasarana kantor dan sumberdaya alam pendukung kelautan dan perikanan.

1. Sumberdaya Manusia (SDM)

- a. Sumberdaya Manusia (SDM) berupa pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen total keseluruhan berjumlah 116 orang yang terdiri dari pegawai PNS sebanyak 70 orang (60,34%) dan pegawai Non PNS sebanyak 46 orang (39,66%).

Pegawai PNS yang ada terdiri dari Pegawai Struktural sejumlah 52 orang (74,29%) dan Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan sejumlah 18 orang (25,71%). Kondisi pegawai PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel. 2.1 Daftar Komposisi SDM Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2016

Eselon	Berdasarkan Golongan						Berdasarkan Pendidikan						Diklat yang diikuti		
	Gol.IV	Gol.III	Gol.II	Gol.I	Non PNS	Jml	S2	S1	SMA	SMP	SD	Jml	Strukt ural	Fungsi onal	Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Eselon II	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	1
Eselon III	3	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	3	3	-	3
Eselon IV	1	9	0	-	-	10	3	6	1	-	-	10	6	-	6
Staf	-	37	17	2	-	56	-	23	26	4	3	56	-	18	18
THL	-	-	-	-	46	46	-	6	20	18	2	46	-	-	-
Jumlah	5	46	17	2	46	116	4	38	47	22	5	116	10	18	28
% dr jml peg	4.31	39.66	14.66	1.72	39.66	100.00	3.45	32.76	40.52	18.97	4.31	100.00	8.62	15.52	24.14

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa total karyawan Dinas Kelautan dan Perikanan saat ini mencapai 116 orang, tenaga ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan teknis dilapangan karena pegawai non PNS yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dinas secara teknis tertentu, sebagai berikut :

- Penjaga malam kantor : 2 orang
- Pengelola TPI (pelaksanaan lelang) : 30 orang
- Pengelola BBI Pringtutul : 5 orang

- Pengelola Pasar Benih Ikan Ungaran : 1 orang
- Pengelola Tambak Dinas : 2 orang
- Tenaga Penyuluh Bantu (TPB) : 6 orang

Saat ini ada kepala seksi yang tidak memiliki staf, atau dalam kata lain ada staf yang memiliki lebih dari satu atasan, sehingga pekerjaan administrasi agak terhambat. Padahal idealnya minimal satu seksi memiliki empat staf, satu mengurus administrasi satu mengurus keuangan dan yang dua mengurus teknis dilapangan. Bila ada sepuluh kasi maka ideal ada 40 staf, padahal staf karyawan yang sejumlah 38 orang, 13 orang merupakan tenaga teknis di TPI, BBI, Tambak Dinas dan Pasar Ikan Ungaran, sehingga staf yang ada hanya 25 orang.

Total kebutuhan karyawan (staf) sebanyak 40 orang, yang ada sejumlah 25 orang sehingga masih kurang 15 orang. Kebutuhan tenaga teknis di lapangan mencapai 46 orang yang tersedia baru 13 orang sehingga masih kurang 33 orang sehingga total kebutuhan karyawan sejumlah 48 orang.

- b. Secara kualitatif SDM yang ada sudah lumayan baik karena dilihat dari segi pendidikan yang paling banyak tingkat SMA sebesar 40,52%, kemudian S1 sebesar 32,76%, sedangkan SMP sebesar 18,97%, SD sebesar 4,31% dan terakhir S2 sebesar 3,45%.

Jika dilihat dari diklat yang pernah diikuti oleh masing-masing karyawan, bahwa pejabat eselon IV-II sejumlah 14 orang yang sudah mengikuti diklat struktural sebanyak 10 orang (71,43%) hanya sisanya sejumlah 4 orang (28,57%) yang belum mengikuti. Untuk diklat fungsional yang diperuntukan bagi pejabat fungsional, dari 18 orang pejabat fungsional sudah semuanya (100%) mengikutinya.

Dari kedua hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa secara kualitatif SDM yang ada sudah mencukupi.

- c. Berdasarkan point a dan b diatas untuk mencukupi kebutuhan SDM secara kuantitatif maka dinas mengambil tenaga harian lepas (THL) yang dianggarkan oleh masing-masing kegiatan yang membutuhkan, selain itu juga secara resmi meminta kepada BKD untuk diberi tenaga tambahan apabila memungkinkan. Selain itu upaya untuk tetap meningkatkan SDM secara kualitatif dengan terus mengirimkan setiap karyawan manakala

ada kesempatan untuk mengikuti berbagai macam pelatihan termasuk Diklat PIM maupun diklat teknis lainnya.

2. Data Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.

Data kondisi sarana dan prasarana yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.2 Data Sumber Daya Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016

NO	JENIS SARPRAS	KONDISI			JML	KEBUTUHAN JANGKA 5 TH	PERLU PENAMBAHAN	PERLU PEMELIHARAAN
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat				
1	Gedung Kantor	1	-	-	1	1	-	1
	MCK	12	-	-	12	12	-	12
	Listrik 23.000 W	1	-	-	1	2	20,000	1
	PAM	2	-	-	2	3	1	2
	AC Split	16	-	-	16	18	2	16
	Kulkas	3	-	-	3	4	1	3
	Freezer	2	-	-	2	2	0	2
2	Kendaraan Roda 4	7	-	-	7	8	1	7
	Kendaraan Roda 3	3	-	-	3	4	1	3
	Kendaraan Roda 2	56	-	-	56	70	14	56
3	Meja Kerja	92	-	-	92	120	28	92
	Meja Rapat	34	-	-	34	50	16	34
4	Kursi Kerja	83	-	-	83	85	2	83
	Kursi Tamu	8	-	-	8	10	2	8
	Kursi Putar	6	-	-	6	12	6	6
	Kursi Plastik	0	-	-	0	-	-	-
	Kursi Tunggu	4	-	-	4	6	2	4
	Sices	14	-	-	14	15	1	14
5	Alamari Kayu	8	-	-	8	8	-	8
	Filling Cabinet	6	-	-	6	10	4	6
	Almari Besi	5	-	-	5	-	-	-
	Rak Besi	0	-	-	0	5	5	-
6	Sound System	3	-	-	3	4	1	3
	Kipas Angin	5	-	-	5	6	1	5
	TV	5	-	-	5	6	1	5
	Telepon	1	-	-	1	1	-	1
	RIC/SSB	4	-	-	4	5	1	4
	HT	18	-	-	18	18	0	18
7	Computer	8	-	-	8	10	2	8
	Lap Top	5	-	-	5	6	1	5
	Note Book	26	-	-	26	30	4	26
8	Mesin Ketik	3	-	-	3	5	2	3

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kondisi sarana dan prasarana yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan semuanya masih dalam kondisi baik, hal ini dikarenakan rehab total/pembangunan gedung baru dilakukan ditahun 2014 sehingga kondisinya masih baru dan baik, namun demikian tetap perlu disiapkan dana pemeliharaan karena walaupun gedung baru namun tetap ada kerusakan kecil disana-sini. Disamping itu juga karena pembangunan gedung baru juga sarana dan prasarana yang sudah ada harus disesuaikan dengan kondisi gedung yang

baru agar kelihatan serasi, dan hal ini juga membutuhkan dukungan biaya. Dalam pengadaan sarpras yang baru, yang terpenting adalah pemenuhan peralatan kerja seperti peralatan komputer dan printer juga perlunya alat scanner untuk mendukung penertiban arsip secara elektronik. Selain itu juga perlunya sarana untuk memfasilitasi pertemuan rutin dinas berupa meja dan kursi untuk rapat dengan jumlah karyawan yang cukup banyak, dan juga perlu pengadaan *sound system* yang memadai dengan luas ruang rapat yang baru.

3. Data Sarana dan Prasarana Pendukung Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.

Data kondisi prasarana dan sarana pendukung kegiatan bidang kelautan dan perikanan selama lima tahun terakhir seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.3 Data Sarana dan Prasarana Pendukung Kelautan dan Perikanan Tahun 2016

No	Jenis Sarpras	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	TPI (Unit)	8	8	8	8	8
2.	BBI (Unit)	1	1	1	1	1
3.	Tambak Dinas (Ha)	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64
4.	Pasar Benih Ikan (Unit)	1	1	1	1	1
5.	Kapal Nelayan (Unit)	974	974	974	937	1064
6.	Kendaraan operasional roda 4 (Unit)	4	6	7	7	6
7.	Kendaraan operasional roda 2 (Unit)	30	40	48	56	59

Berdasarkan Tabel. 2.3 dapat dilihat bahwa sarpras pendukung kelautan dan perikanan sudah cukup memadai, namun satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah pada jumlah kapal nelayan. Hal ini karena kapal nelayan ini bukan merupakan asset dinas namun keberadaanya sangat penting karena merupakan salah satu pendukung kinerja dinas dalam mencapai angka produksi perikanan tangkap, sehingga dalam setiap program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan selalu menjadi prioritas program disamping program-program yang lain.

Peran sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Kebumen cukup strategis dalam mendukung pembangunan masyarakat kelautan dan perikanan secara umum, baik ditinjau dari perspektif ekonomi, sosial, maupun budaya. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah

masyarakat yang menyandarkan mata pencahariannya dari sektor kelautan dan perikanan, menguatnya *trend* kebanggaan masyarakat khususnya generasi muda pada kegiatan bidang perikanan dan kelautan, serta meningkatnya apresiasi masyarakat untuk mengkonsumsi produk pangan berbahan baku ikan.

Kabupaten Kebumen mempunyai luas wilayah sebesar 158.111, 50 ha atau 1.581, 11 km² dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan pegunungan, namun sebagian besar merupakan dataran rendah. Dari luas wilayah Kabupaten Kebumen, tercatat 49.768,00 hektare atau sekitar 31,04% sebagai lahan sawah dan 108.343,50 hektare atau 68,96% sebagai lahan kering. Daerah selatan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dengan panjang pantai mencapai 57,5 km, yang terdiri dari 32 Desa pesisir yang terbagi dalam 8 Kecamatan.

Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan di Kabupaten Kebumen, mempunyai prospek untuk dikembangkan pada usaha perikanan tangkap, usaha budidaya perikanan payau, usaha budidaya air tawar di kolam, sawah dan perairan umum yang tersebar di seluruh kecamatan dan usaha pengolahan serta pemasaran produk perikanan. Semua usaha tersebut berkembang dengan baik di Kabupaten Kebumen.

Namun untuk mendukung potensi yang sudah ada tetap perlu diadakan sarana dan prasarana sebagai alat pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan diantaranya adalah sarana dan prasarana perkantoran yang berupa komputer, printer, peningkatan kapasitas jaringan internet dan *scanner* untuk proses pengarsipan dokumen secara elektronik, serta fasilitas generator set sebagai antisipasi pemadaman listrik sehingga aktifitas kantor tetap dapat berjalan. Demikian juga dengan sarana pendukung kelautan dan perikanan terutama jumlah kapal nelayan harus tetap ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas (dari kapasitas 1 GT menjadi > 3 GT untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap). Selain itu juga sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya seperti BBI dan tambak dinas harus tetap dipelihara untuk tetap operasional sebagaimana yang diharapkan. Peningkatan konsumsi makan ikan bagi masyarakat juga harus tetap diperhatikan sehingga sarana dan prasarana Pasar Ikan di Ungaran perlu terus dipelihara dan ditingkatkan.

F. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.

1. Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen

Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya, perlu dilakukan analisis capaian kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir Review pencapaian kinerja yang dituangkan pada tabel 2.4. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel. 2.4 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target SPM	Target IKK	Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Peningkatan Produksi Benih Ikan (ekor)		75%		6.720.140	7.728.161	8.887.386	10.220.493	22.400.000	13.034.874	15.907.750	17.185.082	20.000.000	24.300.000	193,97%	205,84%	193,36%	195,69%	108,48%
2	Peningkatan Produksi Ikan (ton)		72%																
	- Perikanan Tangkap		40%		3.378,16	3.715,98	4.087,57	4.496,33	7.922,78	5.138	3.861,52	8.423,09	7.598,47	870,89	152,09%	103,92%	206,07%	77,84%	-705,19%
	- Perikanan Budidaya		60%		397,97	437,77	503,43	578,95	2.169,43	658,25	806,24	1.011,84	2.008,73	2.221,17	165,40%	184,17%	200,99%	241,08%	102,00%
3	Peningkatan Produksi Hasil Olahan Ikan		25%		5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	7%	10%	3,95%	100%	100%	140%	200%	100,89%
4	Angka Konsumsi Makan Ikan (kg)		9,66 kg/ka/th		8,35	8,76	9,2	9,64	14,84	9.01	10.05	12.28	13.65	15,10	107,90%	114,73%	133,49%	141,59%	101,75%
5	Peningkatan Jumlah kelompok masyarakat kelautan dan perikanan		10%																
	- Pokdakan		15%		315	325	334	348	358	385	400	416	420	546	122,22%	123,08%	124,55%	120,69%	152,00%
	- UPR		8 unit		0	5	0	8	10	0	5	0	8	8		100%		100%	80%
	- Pokdahsar		50%		20	40	60	80	100	67	91	96	101	118	335,00%	227,00%	160,00%	126,00%	118,00%
	- KUB (Nelayan)		50%		79	87	95	105	116	130	135	144	145	141	164,56%	155,17%	151,58%	142,86%	121,00%
	- Pokmaswas		12 klpk		3	4	5	6	8	5	8	9	12	17	166,67%	200%	180%	200%	113%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari keempat indikator kinerja utama yang menjadi ukuran kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan, semuanya pada akhir tahun renstra sudah mencapai target. Namun demikian indikator kinerja tersebut akan terus dipertahankan dan pencapaiannya akan ditingkatkan karena inilah tupoksi Dinas Kelautan dan Perikanan.

Untuk indikator kinerja yang lain walaupun bukan utama namun tetap menjadi bahan evaluasi kinerja dinas, dan dari tabel diatas juga bisa dilihat bahwa indikator kinerja selain yang utama juga sudah melampaui target kinerja, namun demikian juga akan tetap dipertahankan dan bahkan akan terus ditingkatkan pencapaiannya.

Pencapaian indikator kinerja utama maupun yang bukan utama akan terus dipertahankan dan pencapaiannya akan terus ditingkatkan dengan program dan kegiatan yang sama namun kapasitasnya diperbesar.

Pencapaian indikator akan terlihat jelas pada pencapaian produksi hasil perikanan sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5 Data Produksi Hasil Perikanan secara Keseluruhan di Kabupaten Kebumen

PRODUKSI DAN NILAI PRODUKSI IKAN YANG DIDARATKAN DI TPI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011 s/d 2016

NO	TAHUN	VOL (Kg)		NILAI(Rp.)	
1	2011	3.062.609,67		28.463.553.238	
2	2012	3.264.538,56	6,59%	45.704.675.648	60,57%
3	2013	1.733.609,00	-46,90%	57.302.530.077	25,38%
4	2014	6.856.887,43	295,53%	53.649.259.553	-6,38%
5	2015	4.087.465,04	-40,39%	78.962.820.611	47,18%
6	2016	870.893,09	-78,69%	45.493.076.278	-42,39%

DATA PRODUKSI IKAN
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2011-2016

PRODUKSI PERIKANAN SECARA KESELURUHAN DI KABUPATEN KEBUMEN.

NO	TAHUN	PERIKANAN TANGKAP				PERIKANAN BUDIDAYA							
						IKAN KONSUMSI				BENIH IKAN			
		VOL (Kg)		NILAI(Rp.)		VOL (Kg)		NILAI(Rp.)		VOL (Ek.)		NILAI(Rp.)	
1	2011	4.975.089,80		39.199.904.400		427.237,60		5.750.792.020		8.341.422		3.138.976.967	
2	2012	5.138.000,00	3,27%	75.913.504.000	93,66%	658.248,30	54,07%	10.130.391.720	76,16%	13.034.874	56,27%	5.011.972.850	59,67%
3	2013	3.188.463,60	-37,94%	81.628.361.727	7,53%	806.240,30	22,48%	12.624.708.990	24,62%	15.907.750	22,04%	5.280.627.760	5,36%
4	2014	8.423.093,00	164,17%	78.474.964.364	-3,86%	1.011.838,84	25,50%	21.687.637.605	71,79%	17.185.082	8,03%	5.809.409.900	10,01%
5	2015	7.598.465,04	-9,79%	85.827.516.797	9,37%	2.008.731,38	98,52%	87.384.086.126	302,92%	20.561.157	19,65%	5.186.647.400	-10,72%
6	2016	6.070.871,45	-20,10%	121.345.095.660	41,38%	2.221.169,00	10,58%	106.239.513.750	21,58%	22.095.065	7,46%	6.337.089.750	22,18%

2. Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Secara total pendanaan terealisasi 105,01%. Indikator yang kurang pendanaanya adalah peningkatan produksi hasil olahan ikan, angka konsumsi makan ikan dan peningkatan jumlah kelompok masyarakat kelautan dan perikanan khususnya Pokmaswas (kelompok masyarakat pengawas) sedangkan indikator yang kurang terserap pendanaanya tidak ada, bahkan semua indicator cenderung untuk mengharapkan adanya penambahan anggaran.

Tabel. 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
Peningkatan pelayanan administrasi	255.248.000	277.950.000	292.637.000	316.180.000	360.700.000	245.789.259	267.363.644	279.005.982	316.000.000	354.608.527	96,29%	96,19%	95,34%	99,94%	98,31%	109,08%	97,22%
Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	60.000.000	69.000.000	73.000.000	213.420.000	107.000.000	52.955.600	62.626.000	70.081.625	213.000.000	105.866.050	88,26%	90,76%	96,00%	99,80%	98,94%	140,82%	94,75%
Pengembangan Data/Informasi	30.000.000	34.522.000	30.000.000	50.000.000	200.000.000	29.926.000	33.556.000	28.404.000	50.000.000	198.808.760	99,75%	97,20%	94,68%	100,00%	99,40%	192,16%	98,21%
Pengembangan data/informasi/ statistik daerah	-	-	-	15.000.000	50.000.000	-	-	-	15.000.000	49.882.472				100,00%	99,76%	233,33%	99,88%
Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	-	60.000.000	25.000.000	25.000.000	300.000.000	-	59.967.329	24.973.400	25.000.000	296.243.000		99,95%	99,89%	100,00%	98,75%	447,22%	99,65%
Pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	-	623.927.000	178.767.000	539.290.000	300.000.000	-	613.736.000	168.193.400	539.000.000	293.885.000		98,37%	94,09%	99,95%	97,96%	128,65%	97,59%
Pengembangan budidaya perikanan	1.952.644.000	2.586.516.000	1.341.632.000	1.701.935.000	2.097.355.000	1.927.705.475	2.514.293.404	1.331.355.325	1.701.935.000	2.080.234.850	98,72%	97,21%	99,23%	100,00%	99,18%	108,61%	98,87%
Pengembangan Perikanan Tangkap	3.025.446.000	2.317.822.000	2.169.200.000	2.614.250.000	3.268.430.000	2.999.749.100	2.157.298.501	2.084.507.608	2.614.250.000	3.202.148.000	99,15%	93,07%	96,10%	100,00%	97,97%	103,93%	97,26%
Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran produksi perikanan	271.000.000	669.458.000	946.542.000	1.053.365.000	1.523.802.000	269.812.885	660.988.453	924.665.685	1.053.365.000	1.516.243.140	99,56%	98,73%	97,69%	100,00%	99,50%	161,09%	99,10%
JUMLAH	5.594.338.000	6.639.195.000	5.056.778.000	6.528.440.000	8.207.287.000	5.525.938.319	6.369.829.331	4.911.187.025	6.527.552.015	8.097.919.799	98,78%	95,94%	97,12%	99,99%	99,99%	112,42%	98,10%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata rasio realisasi anggaran diatas 90%. Hal ini menunjukan bahwa kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan sudah cukup bagus, karena dari anggaran yang ada sudah secara maksimal penyerapannya.

3. Capaian Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Terhadap Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Renstra K/L

Berdasarkan IKK, ada beberapa indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen yang mendukung atau sinergis dengan indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Adapun perbandingan capaian indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen terhadap capaian indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jateng dan Kementerian Kelautan dan Perikanan disajikan pada tabel 2.7

Tabel 2.7. Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen terhadap Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

No	Indikator Kinerja (Indikator sasaran/SPM/IKK/dll)	Sasaran pada Renstra SKPD Kabupaten/Kota	Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
1	2	4	3	5
1	Peningkatan Produksi Benih Ikan (%/th)	12%/th		
	Peningkatan Produksi Ikan			
	- Perikanan Tangkap (%/th)	4,00%/th	3,44%/th	40-50 juta ton per th
	- Perikanan Budidaya (%/th)	8,00%/th	7,59%/th	
2	Peningkatan Produksi Hasil Olahan Ikan (%/th)	3%/th	1 %/th	
3	Angka Konsumsi Makan Ikan (%/th)	8,7%/th	4,86%/th	6,27%/th
4	Peningkatan Jumlah kelompok masyarakat kelautan dan perikanan			
	- Pokdakan (%/th)	5		
	- UPR (unit/th)	3	50	
	- Poklahsar (%/th)	5		
	- KUB /Nelayan (%th)	5		
	- Pokmaswas (kelompok/th)	3	20	

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran Rensra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen masih setara bahkan jauh lebih tinggi daripada sasaran Renstra propinsi maupun K/L dan pada kenyataanya sasaran tersebut dapat tercapai. Hal ini membuktikan bahwa kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen memang baik.

4. Analisis terhadap Dokumen RT/RW

Beberapa indikasi program/kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan dipengaruhi oleh rencana pola ruang sebagaimana yang tertuang pada dokumen RT/RW kabupaten kebumen. Beberapa indikasi program tersebut yaitu Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan Program Pengembangan Budidaya Perikanan.

Berdasarkan hal tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan program-program tersebut menyesuaikan arahan lokasi pengembangan pada dokumen RT/RW. Hasil telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen disajikan pada tabel 2.8

Tabel 2.8 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten/Kota

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
1	Kawasan budidaya	Sebagian kawasan budidaya	Pengembangan Budidaya Perikanan	Perlu penataan kawasan budidaya perikanan	Di luar wilayah sepadan pantai dan diluar kawasan industri
2	Kawasan perikanan tangkap	Kawasan perikanan tangkap	Pengembangan Perikanan Tangkap	Sudah sesuai dengan Pelayanan PD yang ada	Lokasi sudah sesuai dengan RTRW

5. Analisis terhadap Dokumen KLHS

Berdasarkan dokumen KLHS RPJMD kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, ada beberapa catatan dalam perumusan program dan kegiatan sebagai implikasi terhadap pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan beberapa aspek kajian sebagaimana tertuang pada Tabel 2.9 berikut ini.

Tabel 2.9 Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Pembangunan lingkungan TPI dan UPR berpengaruh langsung pada efek turunya fasilitas layanan public, area perdagangan dan industri hilir. Bagian pantai timur merupakan buffer zone dengan kekayaan mangrove yang tinggi dan melindungi daratan, pesisir dan pantai selatan kebumen. Ancaman serius terhadap kawasan lindung yang termasuk dalam situs dengan potensi keanekaragaman hayati sangat tinggi Dampak lebih jauh pembukaan lahan tidak terkendali (alih fungsi lahan) dan aktivitas manusia yang akan menghasilkan limbah.	Harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Penentuan lokasi kegiatan yang sesuai dengan RTRW
2	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Resiko dampak terjadi di pantai bagian barat Kab. Kebumen karena terdapatnya potensi sumber daya terumbu karang terdapat disepanjang wilayah laut dari Kecamatan Ayah diujung barat sampai Kec. Mirit diujung timur. Dampak lain adalah deforestasi ekosistem pantai pesisir khususnya hutan mangrove yang merupakan pagar alam ekosistem pantai dan merupakan zona transisi sebelum kerusakan langsung mengancam daratan. Pelindung efek global warming : naiknya muka air laut, ombak Ancaman penggerusan dan abrasi pantai Akumulasi material sedimen dari hulu dan abrasi pantai berdampak langsung bagi aktivitas pelabuhan dan dermaga Pada fase konstruksi pembangunan UPR akan terjadi pengurangan keragaman hayati yang ada disekitar lokasi kegiatan Peningkatan pencemaran udara dan air	Sudah dibuat FS dan Amdal	Sesuai dengan rekomendasi FS maupun Amdal
3	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Ancaman menurunnya layanan fungsi ekosistem perairan (laut, estuary, sungai) sebagai penyedia sumberdaya perikanan tangkap di wilayah kebumen Perlindungan sumberdaya genetic/plasma nutfah, diperlukan penanganan tataguna ekosistem mangrove sebagaipengendali abrasi pantai Pengembangan kawasan pelabuhan dan dermaga jika tidak terkendali akan menggerus nilai-nilai budaya local (culture service) khususnya nilai tradisi masyarakat pesisir yang unik. Asimilasi dengan budaya luar mungkin akan terjadi, hal ini bisa menimbulkan kondisi positif tetapi sebaliknya dapat mengancam indigenous knowledge (pengetahuan masyarakat local).	Konsep konservasi, pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan	Pentingnya kelompok masyarakat pengawas
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Keberadaan pelabuhan, dermaga dan terminal sebagai fasilitas pendukung utama untuk distribusi dan suplai SDA dari dan ke wilayah Jawa Tengah sudah sangat mendesak tetapi selayaknya juga memperhitungkan ancaman terhadap cadangan SDA Pentingnya membatasi laju alih fungsi lahan dan pembukaan kawasan esensial, melalui mekanisme penerapan regulasi.	Disesuaikan dengan DED	Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Meningkatnya pembukaan lahan, sebagai efek turunan pembangunan tersebut jika tidak dikelola dengan cermat, dipastikan berdampak pada hilangnya buffer zone (gugusan hutan mangrove) dan terancamnya kawasan lindung. Kondisi ini jika tidak dikelola menyebabkan meningkatnya kerentanan dan berkurangnya daya pulih ekosistem Menurunnya kuantitas dan kualitas ekosistem mangrove berimplikasi pada meningkatnya emisi karbon selanjutnya memicu terjadinya perubahan cuaca dan secara global akan mengancam peningkatan muka air laut Pembangunan UPR harus tetap memperhatikan dan mempertahankan keberadaan RTH (ruang terbuka hijau)	Konsep pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan
6	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Pembangunan lingkungan TPI hendaknya tidak mengganggu hutan konservasi yang sudah ditanam. Tahun 2014 sudah dirintis pembuatan hutan mangrove di sepanjang pantai, dari 57,5 km yang ada hutan mangrovenya baru 5 km berupa tanaman cemara laut, nyampung dan ketapang laut.	Pelestarian sumberdaya hayati	Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan

Berdasarkan tabel tersebut, program dan kegiatan yang diarahkan direncanakan akan dilaksanakan dengan melihat aspek kajian tersebut di atas adalah Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan kegiatan Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan, Program Pengembangan Budidaya Perikanan dengan Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya serta Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dengan Kegiatan Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan

Diharapkan nanti pada saat pelaksanaan masing-masing kegiatan sudah berpedoman pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis sehingga pengaruh-pengaruh buruk dari efek pembangunan dapat diminimalisir dan diambil pemanfaatan yang sebesar-besarnya dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan, kebutuhan masyarakat dan pelestarian sumberdaya.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

D. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai dinas teknis yang membidangi kelautan dan perikanan di Kabupaten Kebumen tidak terlepas dari berbagai masalah dan hambatan. Permasalahan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen berkaitan dengan kekuatan dan hambatan yang belum dapat diatasi pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Secara lengkap Identifikasi permasalahan berdasarkan hal tersebut disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Aspek Kajian	Capaian/Ko ndisi Saat ini	Standar yang Diguna- kan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			INTERNAL	EKSTERNAL	
			(KEWENANGAN PD)	(DILUAR KEWENANGAN PD)	
Gambaran Pelayanan SKPD (Indikator program)					
1. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	7.618,06 ton	IKK (4%)	Tenaga teknis dan penyuluh perikanan; Sarana dan prasarana penangkapan ikan	Musim, Kebijakan pemerintah	Permen KP No 1 tahun 2015 terkait penangkapan lobster, kepiting dan rajungan dan undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Belum optimalnya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana penangkapan dan sosialisasi alat tangkap ramah lingkungan serta peningkatan kapasitas SDM bagi para nelayan
2. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	2.008,73 ton	IKK (8%)	Tenaga teknis dan penyuluh perikanan; Sarana dan prasarana budidaya	Pokdakan, Pengusaha tambak, Pabrik pakan	Kurangnya pengetahuan dan teknologi pelaku usaha perikanan, tingginya harga pakan, kurangnya permodalan dan lokasi budidaya tambak udang yang belum sesuai RTRW
3. Peningkatan Benih dengan mutu terjamin	20 juta ekor	IKK (12%)	Belum optimalnya ketersediaan kualitas dan kuantitas benih dan induk unggul bagi pembudidaya ikan;	UPR	Belum optimalnya produksi benih berkualitas unggul;
			Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung perikanan budidaya serta rendahnya penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) yang disebabkan kurangnya penguasaan teknis		Belum optimalnya Pengembangan sarana dan Prasarana Balai Benih ikan
4. Peningkatan produksi hasil olahan perikanan dan kelautan	231,10 ton	IKK (3%)	Sosialisasi gemar makan ikan berikut diversitas produksi, Tenaga teknis, Sarpras lahsar	Poklahsar, minat masyarakat terhadap konsumsi ikan, produk olahan pabrikan	Kapasitas SDM lahsar, kurang optimalnya pelatihan pengolahan dan diversitasnya, pemasaran hasil perikanan, masih minimnya sosialisasi GEMARIKAN
5. Peningkatan angka konsumsi makan ikan	13,65 Kg/ka/th	IKK (8,7%)	Sosialisasi gemar makan ikan, Tenaga teknis, Sarpras lahsar	Poklahsar, minat masyarakat terhadap konsumsi ikan	Kapasitas SDM lahsar, kurang optimalnya pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, masih minimnya sosialisasi GEMARIKAN
6. Peningkatan jumlah kelompok masyarakat pengawas	12 kelompok	IKK (3 kel)	Tenaga Teknis, sarpras pengawasan	Pokmaswas	Adanya penurunan kualitas lingkungan karena perusakan

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			INTERNAL	EKSTERNAL	
			(KEWENANGAN PD)	(DILUAR KEWENANGAN PD)	
Gambaran Pelayanan SKPD (Indikator program)					
7. Kajian Renstra SKPD Provinsi terhadap Sasaran Renstra SKPD Kabupaten / Kota*) dan Renstra K/L	Baik, mencapai sasaran propinsi maupun K/L	IKK	Penganggaran, SDM	Kebijakan pemerintah	Berubahnya penganggaran terutama pada akhir tahun anggaran yang mengakibatkan Renja tidak sesuai dengan Renstra
8. Kajian Renstra terhadap Hasil Telaahan Dokumen RT/RW	Ada arahan	Dok RT/RW Kebumen	Rencana program dan kegiatan	Pola ruang dan tata ruang dalam RTRW	Adanya kawasan budidaya yang berada pada wilayah lindung yaitu sepadan pantai
9. Kajian Renstra terhadap Hasil Analisis Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015	Ada rekomendasi	Dok KLHS RPJMD Kebumen 2016-2021	Rencana Program dan Kegiatan	Dok KLHS RPJMD kab Kbm 2016-2021	Dengan pembukaan kawasan perikanan tangkap dan kawasan budidaya jangan sampai mengganggu SDA dan pelestariannya juga laju alih fungsi lahan yang tidak terkendali

Berdasarkan tabel 3.1, dapat diidentifikasi permasalahan di Dinas Kelautan dan Perikanan antara lain sebagai berikut :

1. Adanya Permen KP No. 1 tahun 2015 tentang penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan, yaitu pembatasan ukuran Lobster, Kepiting dan Rajungan yang boleh ditangkap sehingga mengurangi pendapatan nelayan. Yang pada awalnya juga mengalami penolakan oleh masyarakat, namun setelah diadakan sosialisasi dan pendekatan akhirnya mereka menyadari bahwa hal itu dilakukan untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan.
2. Adanya Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kewenangan luas wilayah laut yang tadinya sampai jarak 4 mil menjadi kewenangan kabupaten sekarang semua kewenangan pengelolaan wilayah laut berada di provinsi dan pusat. Hal ini berimplikasi pada jumlah PPI yang dikelola kabupaten, bila semula ada 8 namun kedepan hanya mengelola 6 PPI. Dua PPI yaitu PPI Logending dan PPI Pasir dikelola Provinsi.
3. Adanya penurunan kualitas lingkungan pantai akibat adanya sampah yang menumpuk ,abrasi maupun kerusakan lain oleh oknum yang tidak bertanggung jawab (penebangan pohon di hutan pantai, pembuatan tambak di sepadan pantai) sehingga mengganggu kenyamanan maupun keamanan wilayah pesisir.
4. Masih adanya beberapa nelayan yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dalam menangkap jenis-jenis ikan tertentu, walaupun hal ini tidak mesti dilakukan oleh nelayan Kebumen namun operasinya berada di wilayah Kebumen, sehingga dikhawatirkan kedepannya akan merusak kelestarian sumber daya hayati baik secara kualitas maupun kuantitas dan bahkan akan memusnahkan beberapa jenis ikan tertentu (ikan langka).
5. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan pelaku usaha perikanan dan kelautan sehingga produk yang mereka hasilkan kualitasnya tidak bisa bersaing dipasaran selain itu minimnya modal juga menyebabkan jumlah produksi mereka terbatas, hal ini menyebabkan pendapatan mereka rendah.

6. Masih rendahnya konsumsi makan ikan di masyarakat yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan keunggulan produk perikanan, kebiasaan pola makan, rendahnya daya beli, kurang meratanya ketersediaan dan adanya isu campuran bahan tambahan makanan yang berbahaya dalam pembuatan olahan hasil perikanan.
7. Kurangnya sarana dan prasarana dan fasilitas penunjang di TPI menyebabkan kurang optimalnya aktivitas nelayan.
8. Tingginya harga pakan menjadi beban yang berat bagi para pembudidaya ikan, sehingga perlu solusi untuk menggunakan pakan alternative dengan mensosialisasikan gerakan pakan mandiri (GERPARI).
9. Perlunya penambahan BBI untuk mencukupi kebutuhan benih ikan bagi pokdakan.
10. Maraknya usaha budidaya tambak disepanjang pesisir selatan Kebumen bagian timur yang berada di wilayah lindung (sepadan pantai). Sehingga kedepan perlu diadakan penataan lingkungan sesuai dengan peruntukan pola ruang dan tata ruang yang ada di RTRW serta rekomendasi yang ada dalam dokumen KLHS RPJMD.

E. Identifikasi Isu-Isu Strategis

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen merupakan perkiraan tantangan dan hambatan yang akan mempengaruhi perjalanan pembangunan pada tahun 2016. Isu penting disusun berdasarkan hasil evaluasi Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2017 – 2022, Tupoksi, masukan hasil FGD dan informasi lain dari berbagai media.

Pada era sekarang ini, teknologi berkembang sangat pesat sehingga kita juga harus mengikuti perkembangan jaman. Beberapa issue strategis yang berupa dinamika internasional, nasional maupun provinsi harus selalu diikuti agar selalu dapat mengantisipasi hambatan-hambatan dan dapat menangkap peluang yang datang dari dunia internasional, nasional maupun provinsi serta dari berbagai informasi pengetahuan dan lain

sebaginya yang dapat diakses melalui media sosial. Beberapa faktor eksternal yang dianggap sebagai issue strategis disajikan pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2. Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1	Mulai dicanangkannya pasar bebas asean (MEA)	Korupsi, kolusi dan nepotisme dikalangan aparaturn pemerintah telah menjadi issue nasional	Adanya Jalan Lintas Selatan-selatan	Menyambut perdagangan bebas MEA dipersiapkan kawasan industry di wilayah selatan Kab. Kebumen
2	Global Warming	Peningkatan muka air laut akibat global warming	Di Pantura Jawa Tengah rob sudah semakin masuk ke dalam wilayah daratan	Perlunya Pelestarian Sumberdaya Alam dan Hayati untuk menjaga kestarian lingkungan alam sekitar
3	Kemajuan teknologi (Perdagangan online)	Perdagangan online mulai semakin diminati masyarakat Indonesia	Pelaku usaha perikanan dan kelautan mulai memasarkan produk mereka ke luar wilayah melalui media elektronik	Dengan pemasaran yang semakin luas diharapkan kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan dan Kelautan makin meningkat
4	Produksi perikanan diminati oleh seluruh penduduk di dunia	Produksi perikanan Indonesia banyak diekspor ke luar negeri	Produksi perikanan Jawa Tengah banyak yang diekspor keluar wilayah Jawa tengah bahkan ke luar negeri	Untuk mendukung ekspor produksi perikanan dan kelautan dibutuhkan peningkatan sarana dan Prasarana produksi perikanan
5	Kualitas SDM pengelola sumberdaya menjadi prioritas pembangunan	Sumber daya ikan nasional masih banyak yang belum dimanfaatkan	Pelatihan kapasitas pelaku usaha perikanan dan kelautan	Kualitas dan Kuantitas SDM pelaku usaha Perikanan dan Kelautan

F. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah adanya faktor penghambat dan faktor pendorong dalam pelayanan kepada masyarakat. Faktor tersebut dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Dinas mendukung pencapaian Visi Kepala Daerah yaitu “Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”. Adapun misinya ada 6 dimana Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendukung misi ke 3 dan 6 yang dimplementasikan melalui program dan kegiatan dalam kurun waktu 2016-2021.

Pada pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka mencapai visi misi itulah sering terjadi beberapa permasalahan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor penghambat maupun faktor pendorong yang berupa faktor internal maupun eksternal. Secara lebih rinci faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pada Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi: Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 3 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing			
a.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Belum optimalnya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana penangkapan dan sosialisasi alat tangkap ramah lingkungan serta peningkatan kapasitas SDM bagi para nelayan Permen KP No 1 tahun 2015 terkait penangkapan lobster, kepiting dan rajungan dan undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah	Kurangnya kapasitas SDM baik kualitas maupun kuantitas Kurangnya sarana dan prasarana pendukung produksi perikanan tangkap Kurangnya pengetahuan dan teknologi	Banyaknya potensi sumberdaya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal Banyaknya SDM pelaku usaha perikanan dan kelautan
b.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Kurangnya pengetahuan dan teknologi pelaku usaha perikanan, tingginya harga pakan, kurangnya permodalan dan lokasi budidaya tambak udang yang belum sesuai RTRW	Kapasitas SDM pelaku usaha perikanan dan kelautan Kurangnya pengetahuan dan teknologi Tingginya harga pakan Kurangnya permodalan	Banyaknya SDM pelaku usaha perikanan dan kelautan Minat usaha masyarakat di bidang kelautan dan perikanan yang semakin meningkat Masuknya pemodal dari luar wilayah kebumen
c.	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Kapasitas SDM lahsar, kurang optimalnya pelatihan pengolahan dan diversitasnya ,pemasaran hasil perikanan, masih minimnya sosialisasi gemarikan	Kurangnya kapasitas SDM Lahsar Kurangnya pelatihan pengolahan Kurangnya produksi dan diversifikasi olahan	Melimpahnya produksi perikanan baik tangkap maupun budidaya Banyaknya sdm lahsar Pemasaran hasil masih terbuka luas
d.	Pemberdayaan Ekonomi	Adanya penurunan kualitas lingkungan karena perusakan	Kurangnya sosialisasi tentang pelestarian sumberdaya alam	Tumbuh dan berkembangnya kelompok masyarakat pengawas
e.	Program Pemberdayaan			
2	Misi 6 : Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan			
a.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM	Terbatasnya SDM	
b.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Masih Kurangnya Sarana/Prasarana aparatur yang memadai		Optimalisasi dan efisiensi sarpras yang ada Adanya dana APBD Provinsi dan APBN
c.	Program Pengembangan Data/Informasi	Belum semua SDM (PPTK) berperan aktif dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan	Seringkali penganggaran maupun anggaran kas tidak sesuai dengan perencanaan	Adanya rakor Pop
d.	Program Pengembangan data / infor-masi / statistik daerah	Belum terdokumennya database secara kontinue dan up to date	Data dari bidang sulit untuk didapat	Adanya tenaga penyuluh bantu dan penyuluh perikanan

Berdasarkan tabel 3.3, dapat diuraikan bahwa faktor penghambat dalam pencapaian misi antara lain :

1. Kurangnya kapasitas SDM baik kualitas maupun kuantitas

SDM yang dimaksud disini adalah dari dalam dinas sendiri karena keterbatasan jumlah karyawan, disamping itu juga karena tingkat pendidikan rata-rata hanya SMA secara kualitas juga masih kurang. Dan SDM yang lain yang juga sangat menentukan disini adalah pelaku usaha perikanan dan kelautan yang berupa kelompok masyarakat nelayan (KUB), kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan), kelompok pengolah dan pemasar (Poklahsar) serta kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas). Secara kuantitas jumlah mereka cukup banyak namun dari segi kualitas mereka masih sangat rendah karena sebagian besar masih masuk dalam kelompok pemula.
2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung produksi perikanan baik tangkap maupun budidaya

Sarana dan prasarana yang mendukung produksi perikanan tangkap antara lain adalah adanya tempat pelelangan ikan (TPI) yang disediakan oleh pemerintah daerah, kapal penangkap ikan (perahu lengkap dengan mesinya) dan juga alat penangkap ikan (jaring dan pancing) yang merupakan milik masyarakat nelayan yang didukung oleh pemerintah baik kabupaten, propinsi bahkan pemerintah pusat untuk membantu pengadaan kapal lengkap beserta alat tangkapnya.

Sedangkan sarana dan prasarana budidaya antara lain adalah BBI (Balai Benih Ikan) dan juga UPR (Unit Pembenihan Rakyat) untuk memproduksi benih ikan, kolam budidaya beserta peralatannya, bibit serta pakan ikan untuk usaha budidaya ikan.

3. Kurangnya pengetahuan dan teknologi baik bidang penangkapan, budidaya maupun pengolahan dan pemasaran.

Pengetahuan dan teknologi disini terutama bagi pelaku usaha perikanan dan kelautan, karena jumlah kelompok yang ada lebih banyak dibandingkan dengan frekwensi dan intensitas pelatihan yang bisa difasilitasi oleh dinas. Selain itu banyak kelompok merupakan kelompok pemula yang baru saja dibentuk.

4. Tingginya harga pakan

Biaya terbesar dalam usaha budidaya ikan adalah pembelian pakan yang mencapai 70 % dari biaya produksi, sehingga teknologi untuk membuat pakan alternative yang lebih ekonomis sangat dibutuhkan disini. Sayangnya kebanyakan kelompok pembudidaya masih berskala kecil sehingga masih menggantungkan pakan dari pabrikan sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang sangat minim.

5. Kurangnya permodalan

Klasifikasi kelompok yang masih pemula tentu saja diikuti dengan masih rendahnya kapasitas SDM, minimnya pengetahuan dan teknologi begitu juga dengan permodalan yang dimiliki. Dengan sedikitnya modal yang dimiliki tentu skala usaha juga kecil, sehingga kurang efisien.

6. Kurangnya produksi dan diversifikasi olahan

Kurangnya permodalan kelompok bukan hanya berakibat pada jumlah produksi, namun juga dengan kualitas, semakin besar modal yang kelompok miliki secara otomatis kualitas produksi juga akan semakin meningkat sehingga produk mereka akan dapat bersaing di

pasaran terutama untuk produk pengolahan hasil perikanan. Begitu juga dengan macam dan ragam olahan yang dihasilkan, semakin banyak ragamnya (diversifikasinya) masyarakat akan mempunyai banyak pilihan sehingga tidak menimbulkan kebosanan. Tidak kalah pentingnya adalah menyangkut perizinan usaha dan sertifikasi produk.

7. Kurangnya sosialisasi tentang pelestarian sumberdaya alam

Kegiatan sosialisasi terkait dengan pelestarian sumberdaya alam sudah dilakukan setiap tahunnya, hanya saja frekwensinya kurang, sehingga perlu ditingkatkan. Disamping itu juga pembentukan kelompok-kelompok masyarakat pengawas menjadi kegiatan yang efektif untuk mendukung program pelestarian, hanya saja kegiatan ini dianggap tidak memberikan keuntungan secara nyata dan cepat sehingga hanya sedikit masyarakat yang tertarik. Ada perkembangan yang menggembirakan beberapa desa telah membuat Peraturan Desa terkait upaya pelestarian sumberdaya alam ini bahkan dengan diinisiasi oleh Dinas, kelompok - kelompok pengawas membuat kegiatan bersama berupa arisan benih ikan utk ditebar di perairan umum. Kegiatan ini perlu terus didorong agar masyarakat yang berpartisipasi terus bertambah dan seterusnya menjadi gerakan seluruh masyarakat.

8. Seringkali penganggaran maupun anggaran kas tidak sesuai dengan perencanaan.

Setiap tahun pasti ada anggaran perubahan yang itu sudah menjadi regulasi dengan adanya penambahan anggaran lewat aspirasi ataupun yang lain sehingga antara renja dengan RKA/DPA tidak akan sama. Begitu juga dengan anggaran kas tentu akan mengalami perubahan, namun ada juga anggaran kas yang tidak sesuai dengan kebutuhannya karena salah dalam perencanaanya.

9. Data dari bidang sulit didapatkan

Data ini terkait dengan data statistik untuk penyusunan database maupun profil dinas. Data statistik tersebut terdiri dari data statistik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan pemasaran serta KP3K. Data statistik bidang tersebut berasal dari masing-masing wilayah, TPI untuk data perikanan tangkap, kecamatan dan BBI serta tambak dinas untuk perikanan budidaya, kecamatan dan pasar untuk pengolahan dan pemasaran serta wilayah pesisir untuk data KP3K.

Sedangkan faktor pendorong dalam pencapaian misi antara lain :

1. Potensi sumberdaya alam yang belum dimanfaatkan secara dioptimalkan

Hal ini tentu saja merupakan peluang yang sangat besar untuk terus mengembangkan usaha perikanan dan kelautan baik secara ekstensif dengan memperluas areal usaha maupun secara intensif dengan menggunakan sistem budidaya maupun sistem penangkapan secara modern dan juga dengan adanya diversifikasi alat untuk menjaga mutu hasil tangkapan sesuai dengan spesifikasi masing-masing jenis ikan.

2. Banyaknya SDM pelaku usaha perikanan dan kelautan

Dengan adanya pasar bebas MEA 2015 dan akan beroperasinya PPI Logending secara optimal akan mengakibatkan semakin banyaknya pelaku usaha perikanan dan kelautan yang dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan sektor perikanan dan kelautan. Selain itu kelompok-kelompok usaha dibidang perikanan maupun kelautan yang sudah ada dan terdaftar di dinas jumlahnya sudah cukup banyak seperti KUB, Pokdakan, Poklahsar maupun Pokmaswas.

3. Minat usaha masyarakat dibidang kelautan dan perikanan yang semakin meningkat

Dengan terbukanya peluang usaha disektor perikanan dan kelautan dengan hasil yang cukup tinggi seperti usaha penangkapan, budidaya khususnya tambak udang serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, karena animo masyarakat yang meningkat terhadap konsumsi ikan.

4. Masuknya pemodal dari luar wilayah kebumen

Pemodal yang masuk ke wilayah Kebumen saat ini memang masih terbatas pada sector penangkapan yaitu masuknya kapal-kapal dari daerah Jawa Barat dan budidaya udang vanamae.

5. Tersedianya produksi perikanan baik tangkap maupun budidaya

Produksi perikanan tangkap maupun budidaya merupakan bahan baku bagi sector pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dengan meningkatnya hasil tangkapan maupun budidaya setiap tahunnya merupakan factor pendukung utama peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran ikan.

6. Pemasaran hasil perikanan masih terbuka luas

Pemasaran produksi perikanan tangkap maupun budidaya masih terbuka luas, hasil tangkapan nelayan sebagian besar diekspor sampai ke luar negeri karena kualitasnya memang super, sementara produksi budidaya terutama udang juga merupakan komoditas ekspor ke luar daerah dan pasaran local. Sementara untuk produksi olahan masih terbuka peluang pemasaran dengan makin meningkatnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan.

7. Tumbuh dan berkembangnya kelompok masyarakat pengawas sumberdaya kelautan dan perikanan

Kelompok masyarakat pengawas sangat dibutuhkan peranya dalam menjaga kelestarian sumberdaya alam, karena keterbatasan SDM maupun anggaran dari dinas maka peran serta masyarakat merupakan hal yang utama penyokong keberhasilan program pelestarian dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan.

8. Optimalisasi dan efisiensi sarpras yang ada

Dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada maka perlu dilakukan optimalisasi dan efisiensi penggunaannya, sehingga menghasilkan kinerja yang maksimal.

9. Adanya dana bantuan dari APBD Provinsi maupun pusat (APBN)

Adanya dana bantuan propinsi maupun pusat sangat membantu pelaksanaan pembangunan di daerah, kegiatan-kegiatan yang membutuhkan anggaran besar sulit dilakukan oleh kabupaten karena keterbatasan anggaran APBD Kabupaten seperti pembangunan PPI Logending.

10. Adanya Rakor Pop

Adanya Rakor Pop sangat membantu dalam proses monitoring dan evaluasi progress masing-masing kegiatan di perangkat daerah.

11. Adanya Tenaga Penyuluh Perikanan Lapangan (PPL) dan Penyuluh Perikanan Bantu (PPB)

Keberadaan Tenaga Penyuluh Perikanan Lapangan dan Penyuluh Perikanan Bantu sangat membantu pelaksanaan tupoksi dinas di wilayah karena mereka merupakan kepanjangan tangan dalam penyampaian program-program dinas dan dari merekalah data statistik tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran serta KP3K didapatkan.

Berdasarkan faktor penghambat dan pendorong dalam permasalahan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan tersebut dapat ditentukan beberapa issue strategis antara lain :

1. Pelestarian sumber daya alam dan hayati;
2. Kesejahteraan pelaku usaha perikanan dan kelautan.;
3. Sarana dan prasarana pendukung peningkatan produksi perikanan dan kelautan;
4. Kualitas dan kuantitas SDM pelaku usaha perikanan dan kelautan; dan
5. Perdagangan bebas MEA yang merupakan peluang sekaligus ancaman bagi pelaku usaha perikanan dan kelautan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

E. Visi

Visi Dinas mengacu pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen yaitu “Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Bersama : bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan

pembangunan, seluruh komponen masyarakat dan pemerintah bergerak bersama-sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis;

2. Menuju : bermakna bahwa dalam melaksanakan pembangunan senantiasa memiliki arah dan tujuan yang jelas dan terukur;
3. Sejahtera : bermakna bahwa pembangunan harus diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan, sandang, papan (perumahan), kesehatan, pendidikan dan sosial sehingga tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab;
4. Unggul : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu mengembangkan dan menciptakan potensi daerah menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing tinggi;
5. Berdaya : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga serta memiliki solusi terbaik dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi;
6. Agamis : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan mengedepankan potensi intelektual dan rohaniyah, yang dicirikan dengan sifat-sifat keimanan, ketakwaan, keadaban, keilmuan, kegigihan dalam kebaikan, kebenaran, dan persaudaraan;
7. Berkelanjutan : bermakna bahwa seluruh pembangunan harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan baik serta memiliki keberlangsungan terus-menerus (berkesinambungan) sehingga tercipta pembangunan yang bermanfaat, berdaya guna

bagi masyarakat dan berwawasan lingkungan.

B. Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
2. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat;
3. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;
5. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan

menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

Dari 6 misi tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait dengan misi 3 dan 6 yang diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan pembangunan.

C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta indikator kinerja terkait pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Tujuan, sasaran, indikator sasaran daerah dan indikator program beserta target kinerja dan kerangka pendanaannya selama periode 2016-2021 pada Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1. Target Indikator Kinerja Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD	Rumus	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Akhir 2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Akhir 2021)
								2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparat pemerintah daerah	Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah sebesar 97,75%	Meningkatnya pelayanan perangkat daerah	Prosentase capaian kinerja pelayanan perangkat daerah	Jumlah Prosentase Capaian Program / Jumlah Program yang dilaksanakan	%	96,35	96,30	96,75	97,00	97,25	97,50	97,75	97,75
2	Pengembangan dan pengelolaan perikanan dalam rangka meningkatkan kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	Meningkatnya Angkanya Pertumbuhan ekonomi hingga menjadi sebesar 6 %	Meningkatnya produksi perikanan	Produksi ikan	(Produksi perikanan (budidaya + tangkap) th n	ton	9.626,79	10.092,21	10.582,68	11.099,70	11.644,91	12.220,02	12.826,88	78.093,19
				Terbentuknya dan berkembangnya Kawasan Agrobisnis Perikanan dan Kelautan		lokasi	-	-	2,00	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00
				Peningkatan produksi benih mutu terjamin	(Produksi produksi benih mutu terjamin thn - (thn-1)/jml produksi olahan hasil perikanan (Th n-1)) x 100%	juta ekor	20,00	22,40	25,09	28,10	31,47	35,25	39,48	201,79
				Meningkatnya Konsumsi hasil perikanan	(Produksi olahan hasil perikanan th n - (thn-1)/jml produksi olahan hasil perikanan (Th n-1)	ton	231,10	238,03	245,17	252,53	260,1	267,91	275,94	1.770,78
				Peningkatan angka konsumsi makan ikan	Angka konsumsi makan ikan	kg/ka/th	13,65	14,84	16,13	17,53	19,06	20,71	22,52	124,44
3	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan azas konservasi, efisien dan lestari	Indeks Kualitas Lingkungan	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	Peningkatan jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Pokmaswas	kelompok	12	15	18	21	24	27	30	30,00

D. Perumusan Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah. Perencanaan yang baik disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat. Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerja, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah yang merata ke seluruh masyarakat dapat terwujud.

Penentuan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan, memerlukan analisis lingkungan yang mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri atas kekuatan dan kelemahan. Sedangkan faktor lingkungan eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Analisis ini diperlukan sebagai media untuk memastikan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan melalui penetapan tujuan (*goal*)

dan sasaran (*objective*) pembangunan daerah yang ingin dicapai serta strateginya dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Proses identifikasi analisis lingkungan ini menggunakan metode analisis SWOT dengan melibatkan seluruh komponen yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah kemudian masukan masyarakat tersebut dihimpun dan dianalisis.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dalam menciptakan nilai, di lain pihak, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati. Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Hasil rumusan strategi dan arah kebijakan berdasarkan masukan dari komponen masyarakat terkait disajikan pada tabel 4.2 dan 4.3. berikut ini.

Tabel 4.2. Tabel Bantu Penentuan Alternatif Strategi

Faktor Eksternal Faktor Internal	Peluang : 1. Banyaknya pelaku usaha perikanan dan kelautan (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan). 2. Beroperasinya PPI Logending (menarik investor untuk masuk sehingga membuka lapangan kerja) 3. Banyak potensi perikanan maupun kelautan yang belum ditangani secara optimal (lahan untuk budidaya masih terbuka luas, jalur operasikapal nelayan belum sampai pada jalur dua, pengolahan hasil perikanan masih 4. Adanya pasar bebas MEA akan menjadi peluang yang besar bagi pemasaran produk-produk hasil perikanan dari Kabupaten Kebumen baik segar maupun olahan. 5. Tingginya minat masyarakat pada usaha perikanan dan kelautan 6. Masih terbukanya peluang investasi (pabrik pakan, tambak udang, cold storage dll). 7. Kebijakan pemerintah yang mendukung usaha perikanan dan kelautan (kredit lunak seperti KUR dan KKPE, sertifikat tanah nelayan dan pembudidaya ikan). 8. Peningkatan pendapatan masyarakat dan kesadaran akan hidup sehat menyebabkan permintaan produk hasil perikanan meningkat.	Tantangan: 1. Kurangnya permodalan (usaha skala kecil, biaya produksi tinggi sehingga menghasilkan produk dengan harga tinggi, kurang bisa bersaing di pasaran) 2. Kurangnya ketrampilan pelaku usaha perikanan dan kelautan 3. Masih rendahnya mutu hasil produk perikanan dan kelautan (teknologi hasil pengolahan dan pengemasar produk masih 4. Pasar bebas MEA merupakan ancaman sekaligus peluang 5. Sistem usaha masih tradisional (karena kurangnya permodalan) 6. Adanya ancaman bencana alam (letak geografis) 7. Adanya cuaca buruk yang menyebabkan gelombang tinggi (nelayan tidak bisa melaut). 8. Berkurangnya areal penangkapan diperairan umum (pendangkalan sungai, beralihnya fungsi lahan, kerusakan lingkungan) 9. Tingginya harga pakan menyebabkan banyak pembudidaya kecil yang gulung tikar dan minimnya keuntungan usaha budidaya ikan
	Kekuatan : 1. Tupoksi Dinas sebagai dinas teknis yang mengelola pembangunan bidang kelautan dan perikanan. 2. Sistem perencanaan dan pengendalian kerja sudah tertata dengan adanya Rencana Kerja Operasional (RKO) 3. Kinerja dan motivasi karyawan cukup tinggi 4. Sarana dan prasarana pendukung perikanan dan kelautan cukup memadai seperti kendaraan operasional, adanya BBI dan TPI yang terpelihara secara berkala serta UPR, kapal nelayan dan alat tangkap nelayan. 5. Kemudahan akses teknologi tepat guna bidang kelautan dan perikanan yang didapat melalui pelatihan maupun teknologi canggih (IT). 6. Sumberdaya alam (laut, waduk, sungai, rawa dan genangan) masih cukup luas begitu juga dengan sumberdaya manusia cukup memadai (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar serta petugas/penyuluh perikanan yang berpengalaman. 7. Tersedianya data dan informasi bidang perikanan dan kelautan. 8. Tersedianya anggaran melalui APBD Kabupaten, Provinsi dan APBN 9. Dukungan permodalan dari pemerintah melalui bantuan peralatan dan pelatihan ketrampilan serta kredit lunak. 10. Semakin berkembangnya kelompok perikanan dan kelautan	Alternatif Strategi : 1. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung peningkatan produksi perikanan dan kelautan secara kualitatif dan kuantitatif a. Membangun perikanan melalui pengembangan kawasan perikanan yang sudah ada; b. Mengembangkan produk benih dan induk berkualitas unggul melalui pengembangan BBI di wilayah timur kebumen dan pengembangan UPR di masyarakat; c. Pengembangan sarana dan prasarana Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) 2. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan dan kelautan dengan strategi : a. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku usaha bidang perikanan dan kelautan dengan mengadakan regenerasi, pembinaan dan pelatihan. b. Intensifikasi, diversifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi usaha perikanan dan kelautan; c. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kelembagaan kelompok Nelayan, Pembudidaya ikan serta Pengolah dan Pemasar hasil perikanan.
Kelemahan: 1. Kualitas SDM teknis yang sesuai dengan profesionalisme masih rendah. 2. Berkurangnya petugas / penyuluh teknis lapangan karena mutasi ataupun pensiun. 3. Terbatasnya anggaran kegiatan pembangunan sehingga harus disusun skala prioritas 4. Terbatasnya kuota pelatihan, sementara begitu banyak petugas/kelompok yang menginginkan untuk mengikutinya. 5. Masih kurangnya aplikasi teknologi tepat guna di tingkat kelompok 6. Belum adanya Kajian Akademis Wilayah Pesisir yang menjadi pedoman Zonasi Wilayah Pesisir. 7. Belum adanya infrastruktur pendukung kelautan dan perikanandengan skala yang memadai (PPI, pabrik pakan ikan, laboratorium penyakit ikan dan cold storage). 8. Terbatasnya kapasitas kapal penangkapan ikan yang mengakibatkan terbatasnya jalur operasional. 9. Masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha perikanan dan kelautan (masih menggunakan system tradisional).	Alternatif Strategi : 3. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan dan kelautan dengan strategi : a. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku usaha bidang perikanan dan kelautan dengan mengadakan regenerasi, pembinaan dan pelatihan. b. Intensifikasi, diversifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi usaha perikanan dan kelautan; c. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kelembagaan kelompok Nelayan, Pembudidaya ikan serta Pengolah dan Pemasar hasil perikanan.	Alternatif Strategi : 3. Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan demi kelstarian sumber daya alam dan hayati, dengan : a. Konservasi kawasan dan jenis sumberdaya ikan yang dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan; b. Peningkatan pengawasan terhadap kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan dengan cara memperbesar peran serta kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) c. Penebaran bibit ikan diperairan umum seperti waduk dan sungai sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian alam dan sumber protein bagi masyarakat untuk meningkatkan angka konsumsi makan ikan d. Penanaman vegetasi pantai untuk melestarikan lingkungan dan sumber hayati serta menambah jumlah reservat sebagai sumber induk/benih alam.

Tabel 4.3. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan			
MISI III : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1 : Pengembangan dan pengelolaan perikanan dalam rangka meningkatkan kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	Sasaran 1.1	Strategi 1.1	Kebijakan 1.1
	Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat perikanan dan kelautan	Meningkatkan hasil produksi perikanan dan kelautan	1. Peningkatan produksi perikanan budidaya, 2. Peningkatan produksi perikanan tangkap, 3. Peningkatan produksi benih dengan mutu terjamin
		Strategi 1.2	Kebijakan 1.2
		Meningkatkan angka konsumsi makanan	1. Peningkatan produksi olahan hasil perikanan 2. Peningkatan angka konsumsi makan ikan
Tujuan 2 : Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air, sumber-daya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan azas konservasi, efisien dan lestari	Sasaran 2.1	Strategi 2.1	Kebijakan 2.1
	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	Meningkatkan kelompok masyarakat pengawas sumberdaya kelautan dan perikanan	Peningkatan kelompok masyarakat pengawas sumberdaya kelautan dan perikanan
MISI IV : Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (<i>Good and Clean Government</i>) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Meningkatnya pelayanan perangkat daerah kepada masyarakat perikanan dan kelautan	Meningkatkan pelayanan perangkat daerah kepada masyarakat perikanan dan kelautan	Peningkatan pelayanan perangkat daerah kepada masyarakat perikanan dan kelautan

Berdasarkan tabel di atas maka beberapa kebijakan yang akan dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan antara lain :

1. Rehabilitasi dan konservasi ekosistem langka di laut/pesisir baik dengan penanganan fisik maupun vegetasi serta meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian ekosistem /lingkungan dengan strategi :
 - a. Pelarangan/pembatasan penangkapan biota/ikan endemic
 - b. Sosialisasi tentang pelestarian sumberdaya alam
2. Meningkatkan pengawasan untuk pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan strategi :
 - a. Memperbesar peran serta kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS).
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pelaku usaha kelautan dan perikanan dengan strategi :
 - a. melakukan temu usaha, temu lapang dan fasilitasi sarana prasarana perikanan dan kelautan serta pengolahan dan pemasaran
 - b. Pameran produk dan hasil pembangunan kelautan dan perikanan

4. Peningkatan kualitas pengembangan budidaya perikanan dengan strategi :
 - a. Optimalisasi dukungan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan (BBI,UPR),
 - b. Peningkatan kemampuan teknis pembudidaya ikan, terutama penerapan Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB),
 - c. Pengembangan pakan ikan mandiri berbahan baku lokal
 - d. Pengembangan kawasan-kawasan Agribisnis Perikanan dengan komoditas unggulan
5. Peningkatan kualitas pengembangan perikanan tangkap dengan strategi:
 - a. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap (Pelabuhan, TPI dll)
 - b. Pemberdayaan usaha perikanan tangkap skala kecil, antara lain melalui : pembinaan, pemberian bantuan kapal, mesin tempel, alat tangkap ramah lingkungan, alat bantu penangkapan ikan (GPS, Fish Finder),
 - c. Fasilitasi perlindungan kepada nelayan kecil (Kartu Nelayan, asuransi nelayan, keamanan dan keselamatan nelayan dengan memperkuat keberadaan SAR / TPKL).
6. Peningkatan kapasitas pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan strategi perbaikan sistem manajemen dan penggunaan teknologi tepat guna;
7. Mengoptimalkan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dengan strategi :
 - a. peningkatan produk yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan pangan,
 - b. memperluas jaringan pasar dan informasi pasar
 - c. peningkatan konsumsi ikan.
8. Meningkatkan pelatihan bagi masyarakat perikanan dengan strategi melalui Pendidikan Non Formal dan Informal.
9. Menyediakan data dan informasi sektor kelautan dan perikanan yang berkualitas dengan strategi penyusunan database atau profil dinas.
10. Meningkatkan kualitas perencanaan program Dinas Kelautan dan Perikanan dengan strategi peningkatan koordinasi perencanaan

internal dan eksternal serta monitoring dan evaluasi secara berkala setiap kegiatan.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program Dinas Kelautan dan Perikanan berisi program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan satuan kerja perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, termasuk dalam menjabarkannya kedalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati serta program pembangunan daerah dalam rangka

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten.

Perumusan rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kerangka pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

Gambaran pembagian urusan masih mengacu pada Lampiran Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

A. Rencana Program

Program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2016-2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur
3. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
4. Program pengembangan Data/Informasi
5. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
6. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
7. Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut
8. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
9. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
10. Program Pelayanan Usaha Perikanan

B. Rencana Kegiatan

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2016-2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan

5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
7. Penyediaan alat tulis kantor
8. Penyediaan barang cetak dan penggandaan
9. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11. Penyediaan makan dan minuman
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
14. Pengadaan Peralatan gedung kantor
15. Pengadaan mebel
16. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
17. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
18. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
19. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
20. Pengembangan bibit ikan unggul
21. Pendampingan pada kelompok pembudidayaan
22. Pembinaan dan pengembangan perikanan
23. Pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan
24. Pengendalian lingkungan dan kesehatan ikan
25. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
26. Rehabilitasi sedang / berat tempat pelelangan ikan
27. Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap
28. Pengembangan Sarana alat tangkap
29. Pembangunan tempat pelelangan ikan
30. Perlindungan Nelayan Terhadap Bencana Alam Laut
31. Pembinaan pelaku usaha perikanan
32. Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi dan pemasaran benih bibit unggul
33. Fasilitasi pelayanan usaha perikanan

Secara lengkap, daftar program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kerangka pendanaannya dituangkan berdasarkan Misi Tujuan dan sasaran serta indikator kinerja daerah disajikan pada Tabel 5.1

Tabel 5.1. Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan SKPD beserta Rencana Pendanaannya Tahun 2016-2021

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pd Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Lokasi
									2016		2017		2018		2019		2020		2021			
									target	Rp.000,-	target	Rp.000,-	target	Rp.000,-	target	Rp.000,-	target	Rp.000,-	target	Rp.000,-		
Misi 3 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat	Pengembangan dan pengelolaan perikanan dalam rangka meningkatkan kinerja ekonomi dan agribisnis perikanan dan kelautan yang memiliki daya saing tinggi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan	Meningkatkan ya Angka Pertumbuha n ekonomi hingga menjadi sebesar 6 %	Meningkatnya produksi perikanan	Produksi ikan	Produksi ikan budidaya + Produksi ikan tangkap dalam 1 tahun		%	9.626,79	10.092,00		10.582,00		11.099,00		11.644,00		12.220,00		12.826,00		12.826,00	
		Meningkatkan agribisnis perikanan dan pendapatan masyarakat di kawasan agribisnis perikanan dan kelautan	Meningkatkan usaha agribisnis perikanan dan kelautan dengan mengembangk an komoditas yang memiliki daya saing tinggi	Terbentuknya dan berkembangnya Kawasan Agribisnis Perikanan dan Kelautan			lokasi	0	0		2		4		6		6		6		6	
					Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi ikan tangkap	ton	7.618,06	7.922,78	3.268.430	8.239,69	2.028.610	8.569,28	5.078.500	8.912,05	9.950.000	9.268,53	5.600.000	9.639,28	6.050.000	9.639,28	
					Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	Pembinaan kelompok Meningkatkan jumlah kelompok perikanan tangkap	kelompok	144,00	151,00	25.000	159,00	73.900	167,00	130.000	175,00	100.000	184,00	100.000	193,00	100.000	193	
					Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan	Terpeliharanya sarana dan prasarana TPI kabupaten	lokasi		8,00	400.000	8,00	350.000	8,00	700.000	8,00	750.000	8,00	800.000	8,00	850.000		
					Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap	Tersedianya sarana operasional 8 TPI, cetak blanko pelelangan ikan dan	bulan		12	451.800	12	626.210	12	600.000	12	600.000	12	600.000	12	600.000		
					Pengembangan Sarana Alat Tangkap	Pemberian Bantuan mesin kapal	paket		953,00	750.000	983,00	390.000	1.013,00	1.060.000	1.043,00	1.000.000	1.073,00	1.000.000	1.103,00	1.000.000		
					Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan	Terlaksananya pembangunan dan pengembangan fasilitas fungsional TPI (Karangduwur dan Argopeni)	lokasi		3	952.000	3	588.500	3	1.588.500	2	6.000.000	1	1.600.000	4	2.000.000		
					Pengembangan Sarana Alat Tangkap (DAK)	Pengadaan kapal >3 GT	unit		15,00	689.630	-	-	21,00	1.000.000	24,00	1.500.000	27,00	1.500.000	30,00	1.500.000		
					Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya produksi ikan budidaya	ton	2008,73	2.169,43	2.640.333	2.342,98	5.012.288	2.530,42	10.066.436	2.732,85	9.340.726	2.951,48	6.691.483	3.187,60	6.696.682	3.187,60	
					Pendampingan pada Kelompok pembudidaya ikan	Terlaksananya pendampingan dan monev pembudidaya ikan	kali	30,00	35,00	542.978	32,00	447.873	45,00	1.869.157	50,00	2.869.157	55,00	3.269.157	60,00	3.569.157		307
						Terlaksananya fasilitasi sarana budidaya perikanan	paket	30	35,00		45,00		60,00		65,00		70,00		70,00			
						Terbentuknya kampung gurami	paket	0	-	-	-	-	1,00		-	-	-	-	-	-	-	Desa Jatijajar dan Ds. Mangunweni Kec. Ayah,
						Terbentuknya kampung nila	paket	0	-	-	-	-	1,00		-	-	-	-	-	-	-	Desa Sempor dan Kedungwringin Kec.

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pd Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Lokasi		
									2016		2017		2018		2019		2020				2021	
									target	Rp.000,-	target	Rp.000,-	target	Rp.000,-	target	Rp.000,-	target	Rp.000,-			target	Rp.000,-
					Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Terbentuknya dan berkembangnya kawasan agrobisnis perikanan dengan pendampingan budidaya sidat, lele, nila, gabus dan gurami serta pengolahan dan pemasaran.	kawasan	-	-	692.978	2,00	2.924.245	4,00	3.744.044	6,00	3.946.569	6,00	622.326	6,00	202.525		Desa Purwodadi Kec. Ku-warasan, Desa Sidoluhur dan Sinungrejo Kec. Am-bal, Desa Tangulangingin dan Jatimalang Kec.Klirong, De-sa Ungaran Kec. Kutowina ngun, Desa Sido Gede Kec. Prembun dan Desa Kedungweru dan Demangsari Kec. Ayah
					Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Tersedianya sarana operasional BBI dan Tambak dinas	paket	2,00	2,00	299.000	2,00	300.000	2,00	500.000	3,00	600.000	3,00	700.000	3,00	800.000		
						Tersedianya benih dengan mutu terjamin	juta ekor	20,00	22,40		25,09		28,10		31,47		35,25		39,48	201,79		
					Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan	Terlaksananya demplot perikanan budidaya	paket	8,00	13,00	1.105.377	15,00	1.291.490	20,00	3.898.235	20,00	1.850.000	20,00	2.000.000	20,00	2.000.000		
						-Penyempurnaan BBI dan tambak dinas	paket	1,00	1,00		1,00		2,00		2,00		2,00		2,00			
					Pengendalian Lingkungan dan Kesehatan Ikan	Tersedianya sarana operasional pengendalian	paket	-	-	-	1,00	48.680	1,00	55.000	1,00	75.000	1,00	100.000	1,00	125.000		
		Meningkatnya Konsumsi hasil	Angka konsumsi ikan	Jumlah produksi perikanan/jumlah penduduk			kg/ka/th	13,65	14,84		16,13		17,53		19,06		20,71		22,52	22,52		
				Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Peningkatan angka konsumsi makan ikan		kg/ka/th	13,65	14,84	1.523.802	16,13	355.978	17,53	1.900.000	19,06	2.100.000	20,71	2.100.000	22,52	2.100.000	22,52	
				Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produksi dan Pemasaran Benih Bibit Unggul	Partisipasi dalam pameran/promosi kelautan dan perikanan, fasilitasi sarpras pengolahan	kali	1,00	2,00	575.000	2,00	355.978	2,00	900.000	2,00	1.100.000	2,00	1.100.000	2,00	1.100.000		semua desa di Kab. Kebumen	
					Peningkatan produksi olahan		ton	231,10	238,03		245,17		252,53		260,1		267,91		275,94	1.540		
				Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produksi dan Pemasaran perikanan	Tersedianya kios mini dan sarpras lahsar hasil perikanan		unit	1,00	3,00	948.802	-	-	7,00	1.000.000	10,00	1.000.000	12,00	1.000.000	15,00	1.000.000		
	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya pesi-sir berdasarkan azas konservasi, efisien dan lestari	Indeks Kualitas Lingkungan	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	Peningkatan pengetahuan teknis dan manajemen kelompok	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Meningkatnya pengetahuan teknis dan manajemen kelompok	kelompok				120,00	175.388	120,00	200.000	150,00	250.000	150,00	250.000	150,00	250.000		
				Pembinaan Pelaku Usaha Perikanan	Terbinanya kelompok pelaku usaha		kelompok	-	-	-	120,00	175.388	120,00	200.000	150,00	250.000	150,00	250.000	150,00	250.000		
											-											
				Terlayannya pelayanan usaha perikanan	Program Pelayanan Usaha Perikanan	Fasilitasi Pelayanan usaha perikanan	bulan				12,00	224.616	12,00	378.930	12,00	400.000	12,00	400.000	12,00	400.000	60	
					Fasilitasi Pelayanan Usaha Perikanan	Fasilitasi Pelayanan usaha perikanan	bulan	-	-	-	12,00	224.616	12,00	378.930	12,00	400.000	12,00	400.000	12,00	400.000	60	

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pd Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Lokasi
									2016		2017		2018		2019		2020		2021			
									target	Rp.000,-	target	Rp.000,-	target	Rp.000,-	target	Rp.000,-	target	Rp.000,-	target	Rp.000,-		
				Perlindungan nelayan	Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut	Penyediaan Fasilitas keselamatan operasional penangkapan ikan	kasus	-	-	-	-	-	12,00	100.000	12,00	120.000	12,00	120.000	12,00	120.000	48	Kab
					Perlindungan Nelayan Terhadap Bencana Alam Laut	Penyediaan Fasilitas keselamatan operasional penangkapan ikan	kasus	-	-	-	-	-	12,00	100.000	12,00	120.000	12,00	120.000	12,00	120.000	48	
Misi 6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah sebesar 96%	Meningkatnya pelayanan perangkat daerah	Prosentase capaian kinerja pelayanan perangkat daerah	Jumlah Prosentase capaian seluruh program/jumlah	Prosentase capaian kinerja pelayanan SKPD	%	90	91,00		92		93,00		94,00		95,00		96,00		96,00	
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran	%	100	12	360.700	12	445.800	12	492.580	12	561.750	12	609.250	12	652.500	100	
					Penyediaan Jasa Surat Mennurat	Jumlah surat terkirim	bulan		12	3.000	12	2.500	12	3.850	12	3.000	12	3.000	12	3.000		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Tersedianya penyediaan Jasa Komunikasi, SDA	bulan		12	51.000	12	70.000	12	77.000	12	90.000	12	90.000	12	90.000		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional/Dinas	Terpenuhnya kebutuhan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional/Dinas	bulan		12	65.000	12	72.500	12	79.750	12	85.000	12	90.000	12	95.000		
					Penyediaan Jasa Administrasi	Pemberian honorarium penatausahaan keuangan	bulan		12	35.000	12	37.500	12	42.350	12	60.000	12	70.000	12	80.000		
					Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya bahan dan alat kebersihan kantor	bulan		12	10.000	12	20.000	12	22.000	12	25.000	12	25.000	12	25.000		
					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya peralatan kerja yang baik	bulan		12	12.500	12	14.000	12	15.400	12	17.500	12	20.000	12	22.500		
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	bulan		12	28.500	12	20.000	12	22.000	12	25.000	12	25.000	12	25.000		
					Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan	bulan		12	14.000	12	15.500	12	17.050	12	20.000	12	25.000	12	30.000		
					Penyediaan Komponen Instalasi	Tersedianya alat listrik dan penerangan	bulan		12	4.000	12	4.500	12	4.950	12	5.500	12	6.000	12	6.500		
					Penyediaan Bahan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan kantor	bulan		12	3.700	12	4.000	12	4.400	12	4.750	12	5.250	12	5.500		
					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu	bulan		12	14.000	12	24.000	12	26.400	12	33.000	12	40.000	12	45.000		
					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Tersedianya dana koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan		12	65.000	12	101.300	12	111.430	12	120.000	12	130.000	12	140.000		
					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya dana koordinasi dan konsultasi dalam daerah	bulan		12	55.000	12	60.000	12	66.000	12	73.000	12	80.000	12	85.000		

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pd Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Lokasi			
									2016		2017		2018		2019		2020				2021		
									target	Rp.000,-	target	Rp.000,-	target	Rp.000,-	target	Rp.000,-	target	Rp.000,-			target	Rp.000,-	
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bertambahnya Sarana dan prasarana aparatur yang memadai	%	100	20	107.000	20	144.870	15	120.000	15	245.000	15	230.000	25	285.000	100		
					Pengadaan Peralatan gedung Kantor	Pengadaan Notebook, laptop, desktop, printer dan UPS	unit	26	28	34.000	30	8.000	30		30	50.000	30	75.000	30	100.000			
						Pengadaan Scanner, LCD Projector	unit	2	3		4		5		6	20.000	6		6				
						Pengadaan Generator Set, kendaraan operasional dinas (Motor roda 2)	unit	-	-		-	1	75.000	2	50.000	2	-	2	-				
					Pengadaan Mebeleur	Pengadaan meja dan kursi rapat	unit	83	133		183		200		200		200		200				
						Pengadaan kursi tamu	unit	9	11	37.000	12	17.050	12	-	12	50.000	12	50.000	12	50.000			
						Pengadaan almari buku dan arsip	unit	-	2		4		6		6		6		6				
					Pemeliharaan Rutin/Berkala	Tersedianya dan terpeliharanya	bulan		12	20.000	12	100.970	12	25.000	12	50.000	12	75.000	12	100.000			
					Pemeliharaan Rutin/Berkala	Tersedianya dana pemeliharaan rutin/berkala	bulan		12	16.000	12	18.850	12	20.000	12	25.000	12	30.000	12	35.000			
					Peralatan Gedung																		
					Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan	dokumen	9,00	9,00	200.000	8,00	433.800	8,00	320.000	8,00	350.000	8,00	400.000	8,00	400.000	30		
					Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan, pengawasan dan FS, profil, LAKIP, Renja, Renstra, LKPJ, LPPD dan RKA/DPA	dokumen	9,00	9,00	200.000	8,00	433.800	8,00	320.000	8,00	350.000	8,00	400.000	8,00	400.000			
					Program Pengembangan data/informasi/statistik Daerah	Tersedianya dokumen database perangkat daerah	dokumen	-	1,00	50.000	1,00	50.000	1,00	60.000	1,00	75.000	1,00	100.000	1,00	100.000	6		
					Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah	Tersusunnya buku database Dinas Kelautan dan Perikanan	dokumen	1,00	1,00	50.000	1,00	50.000	1,00	60.000	1,00	75.000	1,00	100.000	1,00	100.000			
										8.150.265		8.871.350		18.716.446		23.392.476		16.500.733		17.054.182			

BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dalam menjalankan program dan kegiatan untuk pelayanan kepada masyarakat berdasar tugas dan fungsinya adalah dalam rangka pencapaian Visi Misi yang tertuang dalam RPJMD kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Indikator Program yang tertuang dalam renstra ini disamping untuk mendukung pencapaian visi misi tersebut juga untuk pemenuhan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintah daerah.

Beberapa indikator kinerja program yang terkait dengan pencapaian visi misi Bupati dan wakil Bupati tersebut secara lengkap dituangkan dalam Tabel 6.1 dibawah ini.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Program yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Daerah Dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

Indikator Kinerja Sasaran		Satuan	Kondisi Awal Perencanaan (akhir 2015)	Target Kinerja Pada Tahun						Kondisi akhir RPJMD (akhir 2021)
Indikator Kinerja Utama Daerah	Indikator Kinerja Program			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pertumbuhan ekonomi (ADHK)	Meningkatnya Angka Pertumbuhan ekonomi hingga menjadi sebesar 6 %	%	5,83	5,86	5,89	5,91	5,94	5,97	6,00	6,00
	Meningkatnya produksi ikan tangkap	ton	7.618,06	7.922,78	8.239,69	8.569,28	8.912,05	9.268,53	9.639,28	9.639,28
	Pembinaan kelompok nelayan	kelompok	144,00	151,00	159,00	167,00	175,00	184,00	193,00	193,00
	Meningkatnya jumlah kelompok perikanan tangkap	kelompok	144,00	151,00	159,00	167,00	175,00	184,00	193,00	193,00
	Terpeliharanya sarana dan prasarana TPI kabupaten	lokasi	-	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Tersedianya sarana operasional 8 TPI, cetak blanko pelelangan ikan dan tersedianya honor petugas TPI	bulan	-	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Pemberian Bantuan mesin kapal	paket	-	953,00	983,00	1.013,00	1.043,00	1.073,00	1.103,00	1.103,00
	Terlaksananya pembangunan dan pengembangan fasilitas fungsional TPI (Karangduriur, Argopeni)	lokasi	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Pembangunan Sarana / Prasarana TPI di lokasi PPI Logending	lokasi	-	-	1,00	-	-	-	-	-
	Pengadaan kapal >3 GT	unit	-	15,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	30,00
	Perfildungan nelayan	kasus	-	-	-	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	Penyediaan Fasilitas keselamatan operasional penangkapan ikan	kasus	-	-	-	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	Terbentuknya dan berkembangnya Kawasan Agrobisnis Perikanan dan Kelautan	kelompok	-	-	2,00	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Meningkatnya produksi ikan budidaya	ton	2.008,73	2.169,43	2.342,98	2.530,42	2.732,85	2.951,48	3.187,60	3.187,60
	Terlaksananya pembinaan, penyuluhan, bimbingan teknis dan monv perikanan budidaya	kali	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	315,00
	Meningkatnya luas lahan budidaya	ha	124,60	137,06	150,77	165,84	182,43	200,67	220,74	1.057,51
	Terbentuknya dan berkembangnya kawasan agrobisnis perikanan dan kelautan dengan pendampingan budidaya sidat, lele dan gurami serta pengolahan dan pemasaran.	kelompok	-	-	2,00	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Tersedianya sarana operasional BBI dan Tambak dinas	paket	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Tersedianya benih dengan mutu terjamin	juta ekor	20,00	22,40	25,09	28,10	31,47	35,25	39,48	201,79
	Terbangunnya gedung dan sarpras UPR	unit	8,00	13,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	3,00
	Penyempurnaan BBI	unit	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Terbangunya BBI di wilayah timur	unit	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Peningkatan angka konsumsi makan ikan	kg/ka/th	13,65	14,84	16,13	17,53	19,06	20,71	22,52	22,52
	Partisipasi dalam pameran / promosi kelautan dan perikanan, fasilitasi sarpras pengolahan	kali	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Peningkatan produksi olahan hasil perikanan dan kelautan	ton	231,10	238,03	245,17	252,53	260,10	267,91	275,94	1.539,68
	Tersedianya kios mini dan sarpras lahsar hasil perikanan	unit	1,00	3,00	5,00	7,00	10,00	12,00	15,00	15,00
	Meningkatnya pengetahuan teknis & manajemen kelompok	kelompok	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	315,00
	Terbinanya kelompok ekonomi masyarakat pesisir	kelompok	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	315,00

Indikator Kinerja Sasaran		Satuan	Kondisi Awal Perencanaan (akhir 2015)	Target Kinerja Pada Tahun						Kondisi akhir RPJMD (akhir 2021)
Indikator Kinerja Utama Daerah	Indikator Kinerja Program			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Peningkatan jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	kelompok	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	30,00
	Terbentuknya kelompok masyarakat Swakarsa	kelompok	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	30,00
	Pengadaan benih ikan untuk perairan umum	ekor	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	140.000,00
	Pengadaan rambu-rambu peringatan / konservasi	unit	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	200,00
	penyempurnaan pos dan sarpras pengawasan	unit	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Prosentase capaian kinerja pelayanan SKPD	Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah sebesar 96%	%	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00	96,00
	Terpenuhinya kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00	20,00	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,00
	Jumlah surat terkirim	bulan		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	72,00
	Tersedianya penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	bulan		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	72,00
	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional / Dinas	bulan		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	72,00
	Pemberian honorarium penatausahaan keuangan	bulan		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	72,00
	Tersedianya bahan dan alat kebersihan kantor	bulan		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	72,00
	Tersedianya peralatan kerja yang baik	bulan		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	72,00
	Tersedianya Alat Tulis Kantor	bulan		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	72,00
	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan	bulan		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	72,00
	Tersedianya alat listrik dan penerangan bangunan kantor	bulan		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	72,00
	Tersedianya bahan bacaan kantor	bulan		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	72,00
	Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu	bulan		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	72,00
	Tersedianya dana koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	72,00
	Tersedianya dana koordinasi dan konsultasi dalam daerah	bulan		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	72,00
	Bertambahnya Sarana dan prasarana aparatur yang memadai	%	100,00	20,00	20,00	15,00	15,00	15,00	25,00	100,00
	Pengadaan Notebook, printer	unit	26,00	28,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	Pengadaan Scanner, LCD proyektor	unit	2,00	3,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Pengadaan meja/kursi rapat	unit	83,00	133,00	183,00	200,00	200,00	200,00	200,00	5,00
	Pengadaan kursi tamu	unit	9,00	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	5,00
	Pengadaan almari arsip/buku	unit	-	2,00	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Tersedianya dan terpeliharanya gedung kantor	bulan		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	72,00
	Tersedianya dana pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	bulan		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	72,00
	Tersedianya dokumen perencanaan & evaluasi pembangunan	dokumen	25,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	30,00
	Tersusunnya dokumen profil, LAKIP, Renja, Renstra, LKPJ, LPPD dan RKA/DPA	dokumen	9,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	58,00
	Tersedianya buku database Dinas Kelautan	dokumen	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00
	Tersusunnya buku database Dinas Kelautan dan Perikanan	dokumen		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja untuk setiap tahapan kegiatan perencanaan ditetapkan berdasarkan target yang ingindicapaidarimasing-masingkegiatantersebut. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau tanda mengenai kegiatan atau sasaran pengukurannya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Selanjutnya apabila didukung dengan suatu system pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat penting pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indicator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indicator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan yang berpengaruh langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD. Indikator Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dapat dilihat dalam Tabel berikut ini .

Tabel 6.2 Indikator Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Prosentase pemenuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran	80,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	95,00%
4	Prosentase peningkatan Sarana dan prasarana aparatur yang memadai	80,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	95,00%
5	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan	9 dok	9 dok	8 dok	8 dok	8 dok	8 dok	8 dok	8 dok
6	Jumlah Buku database Dinas Kelautan dan Perikanan	1 dok	2 dok	3 dok	3 dok	2 dok	3 dok	3 dok	3 dok
7	Peningkatan jumlah kelompok nelayan perikanan tangkap	144 kel	7 kel	8 kel	8 kel	8 kel	9 kel	9 kel	193 kel
8	Jumlah kelompok nelayan yang dibina	144 kel	35 kel	40 kel	45 kel	50 kel	55 kel	60 kel	285 kel
9	Terpeliharanya sarana dan prasarana TPI kabupaten	8 buah	8 buah	8 buah	8 buah	8 buah	8 buah	8 buah	8 buah
10	Tersedianya sarana operasional 8 TPI, cetak blanko pelelangan ikan dan tersedianya honor petugas TPI	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
11	Jumlah Bantuan mesin kapal	923 unit	30 unit	30 unit	30 unit	30 unit	30 unit	30 unit	180 unit
13	Terlaksananya pembangunan dan pengembangan fasilitas fungsional TPI	8 PPI	3 PPI	3 PPI	3 PPI	3 PPI	30 unit	3 PPI	dengan kondisi baik
14	Jumlah pengadaan kapal >3 GT	12 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	30 unit
15	Jumlah peningkatan luas lahan budidaya	124,6 ha	137,06 ha	150,77 ha	165,82 ha	182,43 ha	200,67 ha	220,74 ha	220,74 ha
16	Pelaksanaan pembinaan, penyuluhan, bintek dan money perikanan budidaya	30 kel	35 kel	40 kel	45 kel	50 kel	55 kel	60 kel	285 kel
17	Jumlah sarana operasional BBI dan Tambak dinas	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	3 paket	3 paket	3 paket	17 paket
18	Jumlah gedung dan sarpras UPR	8 unit	13 unit	15 unit	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit
20	Jumlah BBI	1,00	1 unit	1 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
21	BBI di wilayah timur	-	-	-	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
22	Jumlah Partisipasi dalam pameran/promosi kelautan dan perikanan	1 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	13 kali
23	Jumlah kelompok yang difasilitasi sarpras pengolahan	50 kel	30 kel	30 kel	30 kel	30 kel	30 kel	30 kel	180 kel
24	Peningkatan angka konsumsi makan ikan	13,65	14,84 kg/ka/th	16,13 kg/ka/th	17,53 kg/ka/th	19,06 kg/ka/th	20,71 kg/ka/th	22,52 kg/ka/th	22,52 kg/ka/th
25	Peningkatan jumlah kios mini dan sarpras lahsar hasil perikanan	1,00	3 unit	5 unit	7 unit	10 unit	12 unit	15 unit	15 unit
26	Peningkatan produk olahan hasil perikanan dan kelautan	231,1 ton	238,03 ton	245,17 ton	252,53 ton	260,11 ton	267,91 ton	275,95 ton	275,95 ton
27	Jumlah kelompok ekonomi masyarakat pesisir yang dibina	30 kel	35 kel	40 kel	45 kel	50 kel	55 kel	60 kel	285 kel
28	Jumlah Dokumen Kajian Akademus wilayah Pesisir	-	1 dok	-	-	-	-	-	1 dok
29	Peningkatan jumlah kelompok masyarakat pengawas	12,00	15 kel	18 kel	21 kel	24 kel	27 kel	30 kel	30 kel
30	Jumlah benih ikan yang ditebar untuk perairan umum	20.000 ekor	20.000 ekor	20.000 ekor	20.000 ekor	20.000 ekor	20.000 ekor	20.000 ekor	120.000 ekor
31	Adanya rambu-rambu peringatan/konservasi	20 unit	30 unit	30 unit	30 unit	30 unit	30 unit	30 unit	200 unit

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 merupakan panduan kerja bagi Dinas Kelautan dan Perikanan, selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan kepala daerah terpilih yang direncanakan dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah.

A. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan kerja tahun 2021 dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap menjadi acuan penyusunan rencana kerja tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan tahun 2021 adalah program transisi karena program tersebut adalah program sementara sebelum ditetapkan rencana strategis yang baru yang merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah Periode Tahun 2021-2025. Program transisi ini tetap mengacu pada prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 dan RPJP Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 tahun ke empat.

B. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan selama kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021. Oleh karena itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen berkewajiban melaksanakan program-program dalam rencana strategis dan RPJMD Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen berkewajiban menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsi berpedoman pada rencana strategis dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan rencana strategis, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen diwajibkan menjabarkan rencana strategis ini ke dalam rencana kerja tahunan;
4. Rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016-2021 sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen

